



Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Nur Ida Fitrianti	Penyusun Rencana dan Pelaporan	14 /10/2024	
2.	Diperiksa	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	14 /10/2024	
3.	Disetujui	Tulus Raharjo, A.TD., M.Si.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	14 /10/2024	
4.	Disetujui	Yuliana Y.S. Panjaitan, S.SiT., M.M.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	15 /10/2024	
5.	Disetujui	Milfer Joneliy, S.Kom., M.Si.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	15 /10/2024	
6.	Disetujui	Herry Saputra, S.SiT., M.Si.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	15 /10/2024	



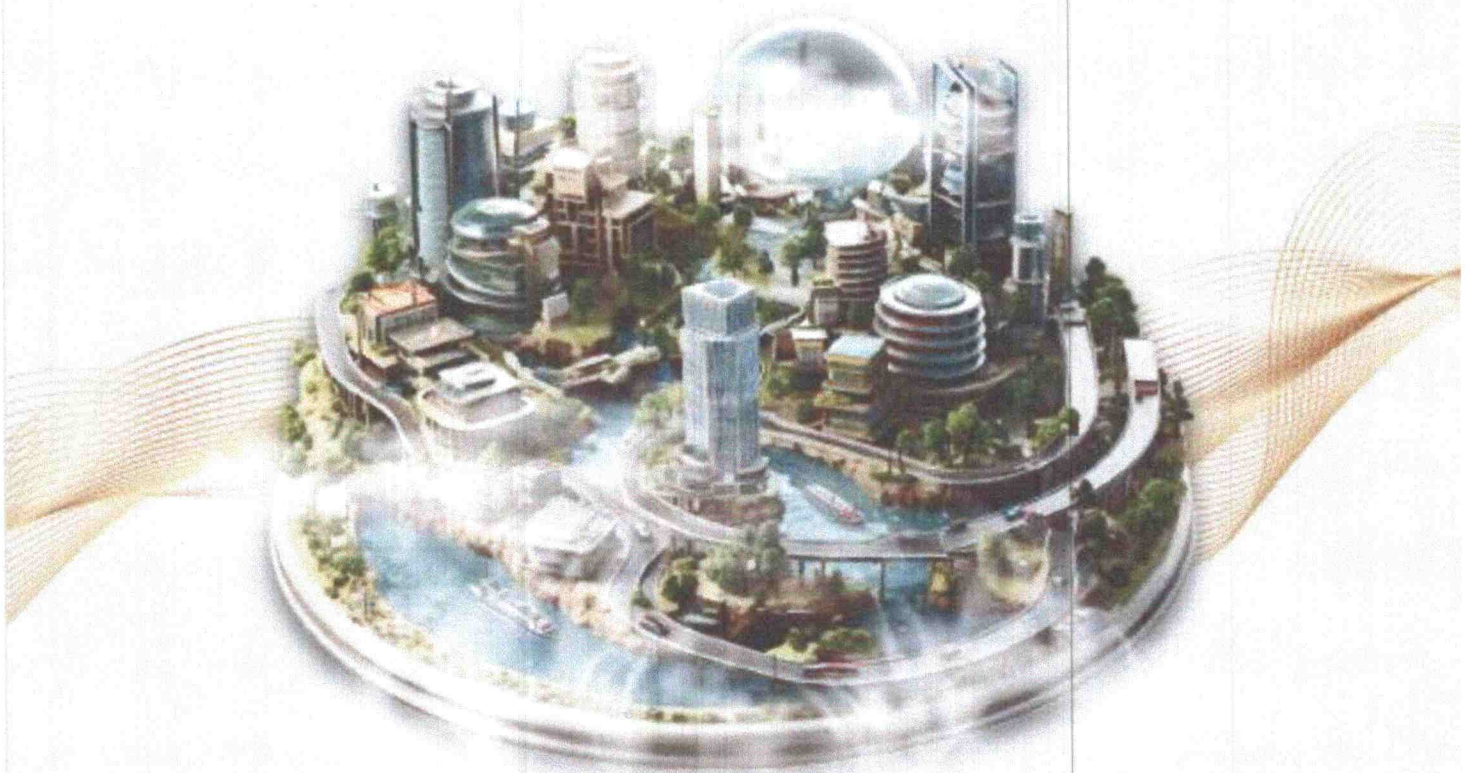
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



LMCK

LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA | 2024

TRIWULAN III



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

 [ditjen_hubdat](https://www.instagram.com/ditjen_hubdat)

 [hubdat151](https://twitter.com/hubdat151)

  [Ditjen Perhubungan Darat](https://www.youtube.com/DitjenPerhubunganDarat)

 hubdat.dephub.go.id



KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN



BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, BPTD Kelas II Sumatera Selatan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan II BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III BPTD Kelas II Sumatera Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2024 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Palembang, 16 Oktober 2024

**KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II
SUMATERA SELATAN**

**NURHADI UNGGUL WIBOWO, S.T., M.T.
NIP. 19711116 199803 1 002**





RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong". Renstra memuat 3 (tiga) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dengan satuan rasio;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat dengan satuan indeks;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat dengan satuan kendaraan per 10.000 keberangkatan.





Dari tujuan di atas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024, terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 71,80 (target 100,0);
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 6,0 (target 6,0);
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar terealisasi sebesar 26,25 (target 25,0);
5. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A terealisasi sebesar 51,42 (target 55,0);
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 80,0 (target 80,0);
7. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 79,10 (target 80,0);
8. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 16,85 (target 16,0);
9. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0,0 (target 840,0);
10. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 70,58 (target 82,0);
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 68,68 (target 90,0); dan
12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 76,0 (target 85,0).

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran kegiatan adalah sebesar 85,15%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA SAMBUTAN	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	2
I.1 Latar Belakang	2
I.2 Sumber Daya Manusia	5
I.3 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	5
I.4 Sistematika Laporan	10
I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis	14
BAB II TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA	20
II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	21
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	23
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	25
a.1 Definisi Indikator Kinerja	25
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	26
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	27
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	29
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	29
a.1 Definisi Indikator Kinerja	29
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	30
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	30
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	32
IKK. 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	32
a.1 Definisi Indikator Kinerja	32
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	33

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	33
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	35
SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATKAN PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.....	35
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	35
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	38
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	38
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	40
IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	41
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	41
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	41
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	42
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	45
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	45
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	45
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	46
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	47
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	51
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal.....	51
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	51
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	52
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	53
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	55
IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	55
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	55
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	55
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	56
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	58
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan.....	59
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	59
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	59

a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	60
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	62
IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	62
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	62
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	63
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	64
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	65
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	66
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	66
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	67
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	68
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	70
SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	70
a.1 Definisi Indikator Kinerja.....	70
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024	71
a.3 Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	72
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang	74
II.3 REALISASI ANGGARAN	75
II.2.1.1 Pagu Anggaran	75
II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2024.....	76
II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2018-2024	78
II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	80
II.2.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	80
II.2.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024.....	81
II.2.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	82
II.2.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	84
II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024	85
II.2.4 Hambatan dan Kendala	86

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024	14
Tabel I.2	Rencana Kinerja Tahun 2024	16
Tabel I.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel II.1	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024	24
Tabel II.2	Realisasi Keperintisan Angkutan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan	28
Tabel II.3	Aspek Penilaian Persentase Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A (Aspek Keselamatan, Keamanan, dan Keandalan/Keteraturan)	36
Tabel II.4	Aspek Penilaian Persentase Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A (Aspek Kenyamanan, Kemudahan/Keterjangkauan, dan Kesetaraan)	37
Tabel II.5	Hasil Penilaian Pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimum) di Terminal Tipe A Provinsi Sumsel	40
Tabel II.6	Aspek Penilaian Penerapan SMART Terminal Tipe A	44
Tabel II.7	Aspek Penilaian Persentase SPM (Standar Pelayanan Minimum) di Pelabuhan SDP	46
Tabel II.8	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP Triwulan III	50
Tabel II.9	Konversi Nilai Pelayanan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP	50
Tabel II.10	Asumsi Pembobotan Pemenuhan Item Perlengkapan Jalan	52
Tabel II.11	Realisasi Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Pada Triwulan III Tahun 2024	58
Tabel II.12	Realisasi Data Pelanggaran Kelebihan Muatan di UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa, dan UPPKB Kertapati Triwulan III Tahun 2024	58
Tabel II.13	Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	67

Tabel II.14	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	69
Tabel II.15	Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	71
Tabel II.16	Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	74
Tabel II.17	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024	75
Tabel II.18	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024	75
Tabel II.19	Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan III Tahun 2024	75
Tabel II.20	Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan III Tahun 2024	75
Tabel II.21	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024	76
Tabel II.22	Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2024	76
Tabel II.23	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024	77
Tabel II.24	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024	78
Tabel II.25	Kegiatan Program Yang Ada Dalam DIPA Tahun 2024	80
Tabel II.26	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024	81
Tabel II.27	Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan III Tahun 2024	82
Tabel II.28	Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	84
Tabel II.29	Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024	84
Tabel II.30	Efisiensi Anggaran	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional	26
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	30
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	33
Gambar II.4	Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	38
Gambar II.5	Grafik Capaian IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	42
Gambar II.6	Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	47
Gambar II.7	Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	53
Gambar II.8	Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	56
Gambar II.9	Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	60
Gambar II.10	Grafik Capaian IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	63
Gambar II.11	Grafik Capaian IKK5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	68
Gambar II.12	Grafik Capaian IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	72
Gambar II.13	Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024	78
Gambar II.14	Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan III Tahun 2024	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Lampiran 4. Rencana Aksi Tahun 2024

Lampiran 5. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024



BABI



PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, *Transparan*, *Akuntable*, *Efektif* dan *Efisien* sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.



I.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengelola Transportasi Darat semula terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018. Selanjutnya pada Tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur dan pemecahan Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi. Tipologi (BPTD) terdiri atas:

1. BPTD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal untuk barang umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian, dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan disebut BPTD Kelas I;
2. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas II;
3. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Kelas III;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Prasarana;
3. Bidang Sarana dan Angkutan;
4. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

I.1.2 Bagan Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian, satuan pelayanan dan kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

A. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

B. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

C. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan

dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

D. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

I.2 Sumber Daya Manusia

Data sumber daya manusia pada satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan pada Tahun 2024 meliputi:

- A. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 187 Orang;
- B. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 10 Orang;
- C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 Orang; dan
- D. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 261 Orang.

I.3 Potensi Isu Strategis Permasalahan

I.3.1 Potensi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan sebagai unsur pembantu pimpinan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang transportasi darat. Potensi pengembangan pada bidang transportasi darat adalah sebagai berikut:

- A. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan transportasi darat akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- B. Teknologi transportasi darat akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- C. Dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur transportasi darat, serta akan memperluas jangkauan;
- D. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan transportasi darat berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi AMDAL sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan transportasi darat yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh Lembaga-lembaga yang telah ada. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif.

I.3.2 Isu Strategis

- A. Membangun Konektivitas Nasional untuk keseimbangan pembangunan Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antar wilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional:

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung Kerjasama regional dan global;
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan;
6. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Lembaga pengembangan sumber daya manusia.

B. Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdayasaing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan LRT diharapkan dapat meningkatkan peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban. Arah kebijakandan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah:

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu;
2. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan;
3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

I.3.3 Permasalahan

A. Permasalahan Transportasi Angkutan Jalan

1. Rendahnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat kerusakan di jalan, belum terpadunya pembangunan prasarana jalan dengan sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan jalan, antarkota, perkotaan dan pedesaan.
2. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan yang dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat dari :
 - a. Pengawasan melalui jembatan timbang belum optimal dikarenakan belum semua jembatan timbang beroperasi;
 - b. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat: disiplin pengguna jalan yang rendah; rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
 - c. Masalah mobilitas, terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan, akibat:
 - a) Terbatasnya perkembangan kapasitas prasarana jalan dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan;
 - b) Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;
 - c) Masalah keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan; banyaknya pungutan dan retribusi di jalan yang membuat biaya angkut di jalan belum efisien;
3. Masalah peraturan dan kelembagaan, terutama:
 - a. Belum terpadunya tatanan transportasi nasional dan wilayah;
 - b. Masalah pendidikan dan *law enforcement* peraturan yang belum efektif dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan.

Pelanggaran lalu lintas dibedakan menjadi pelanggaran muatan dan/atau dimensi, pelanggaran perijinan angkutan orang dan/atau barang, pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran kelengkapan dokumen, pelanggaran rambu. Masalah disiplin berlalu lintas juga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- c. Masih terbatasnya pengembangan SDM di bidang LLAJ baik di tingkat regulator maupun operator, pembinaan usaha angkutan serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana LLAJ yang lebih efisien dan ramah lingkungan;
- d. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan suara) akibat kemacetan dan masih dominannya penggunaan lalu lintas kendaraan pribadi di jalan, terutama di wilayah perkotaan. Rendahnya kualitas dan kuantitas angkutan umum terutama transportasi perkotaan akibat belum berkembangnya keterpaduan rencana tata ruang dan transportasi perkotaan, kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan transportasi, rendahnya disiplin masyarakat pengguna, profesionalitas aparat dan operator transportasi, tingginya tingkat kemacetan lalu lintas pada jam sibuk, serta rendahnya kualitas pelayanan transportasi umum.
- e. Permasalahan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - a) Belum ada data yang lengkap mengenai peta alur pelayaran sungai danau;
 - b) Terbatasnya jumlah SDM sehingga pelaksanaan Monitoring dan Pengumpulan Data Transportasi SDP di daerah kurang optimal;
 - c) Belum dilaksanakan penetapan kelas alur-pelayaran sungai dan danau sebagai batas wilayah administrasi dan pembagian kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - d) Belum ada buku petunjuk-pelayaran di sungai dan danau.
- f. Permasalahan Transportasi Perkotaan
 - a) Kurangnya panduan tentang penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - b) Kurangnya pemahaman terhadap penyelenggaraan transportasi perkotaan;
 - c) Kurang jelasnya kewenangan penanganan masalah transportasi perkotaan khususnya pada kawasan aglomerasi;

- d) Masih belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan transportasi;
- e) Kemacetan lalu lintas;
- f) Pelayanan angkutan umum belum memadai;
- g) Pencemaran udara akibat kendaraan bermotor.
- g. Permasalahan Keselamatan Transportasi Darat
 - a) Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
 - b) Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;
 - c) Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
 - d) Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

I.4 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

A. SP1.....

- Uraian Sasaran Program

A.1. IKP1

A.1.1 Definisi Indikator Kinerja

A.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A.1.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.1.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2024

A.1.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

A.2. IKP 2

A.2.1 Definisi Indikator Kinerja

A.2.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

A.2.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.2.4 Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

A.2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

A.2.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

- Uraian Sasaran Program

B.1. IKP 1

B.1.1. Definisi Indikator Kinerja

B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

B.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

B.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B.2. IKP 6

- B.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022
- B.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B.3. IKP 7

- B.3.1. Definisi Indikator Kinerja
- B.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- B.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- B.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- B.3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022
- B.3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

B. SP3.....

- Uraian Sasaran Program

C.1. IKP 1

- C.1.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- C.1.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022
- C.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

C.2. IKP2

- C.2.1. Definisi Indikator Kinerja
- C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

C.2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2022

C.2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

II.3 Pengukuran Capaian Kinerja

III.3.1Alokasi Anggaran Tahun 2024

- Pagu Anggaran
- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2017 – 2024

III.3.2Realisasi Anggaran Tahun 2024

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Lain – lain yang dianggap perlu.

I.5 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, BPTD Kelas II Sumatera Selatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel I.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan BPTD Kelas II Sumatera Selatan sesuai Revisi Rencana Strategis BPTD Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020 – 2024

	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2024	TARGET 2024
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	1
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	7
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	0	7
SK2	Meningkatnya pelayanan	IKK2.1	Persentase pelaksanaan	%	100	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2024	TARGET 2024
transportasi darat		Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A				
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0	60	65
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pelabuhan SDP	%	100	100	100
SK4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat		IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	20	10	13
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	1	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	1200	1300
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	100	100
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	25	1	1
SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis		IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2019	TARGET 2020-2024	TARGET 2024
Transportasi Darat							
WA		PROGRM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	85	85

I.5.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat.

Tabel I.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

I.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Revisi Perjanjian Kinerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran **Rp. 176.330.836.000,-** adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7
			IKK1.6	Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
2	SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25
			IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55
			IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	80
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2024
			IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16
			IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	840
			IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	82
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan**Anggaran**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	33.114.165.000,-
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	70.208.755.000,-
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	31.663.460.000,-
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	6.136.352.000,-
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	109.000.000,-
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	5.671.393.000,-
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	29.427.711.000,-

BAB II



TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA



BAB II

TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

II.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN				PAGU TAHUNAN	TRIWULAN III					
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi						90,60%			81,55%
IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	3.215.165.000	100	71,80	71,80%	2.411.373.750	1.782.342.554	73,91%
IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	7	12.840.287.000	7	7,00	100,00%	9.630.215.250	8.544.530.390	88,73%
IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6	4.112.548.000	6	6,00	100,00%	3.084.411.000	2.529.763.701	82,02%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat						99,50%			78,87%
IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	25	869.696.000	25	26,25	105,00%	652.272.000	525.895.000	80,63%
IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	55	4.804.217.000	55	51,42	93,49%	3.603.162.750	3.218.035.582	89,31%
IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	80	35.000.000	80	80,00	100,00%	26.250.000	17.500.000	66,67%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat						69,91%			47,00%
IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	24.115.850.000	80	79,10	98,88%	18.086.887.500	17.532.558.034	96,94%
IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	16	4.274.289.000	16	16,85	94,69%	3.205.716.750	2.851.948.411	88,96%
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1300	500.000.000	840	0,00	0,00%	350.000.000	0,00	0,00%
IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	831.300.000	82	70,58	86,07%	623.475.000	324370218	52,03%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						76,31%			59,91%
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90.587.597.000	90	68,68	76,31%	67.940.697.750	40.702.465.502	59,91%
WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						89,41%			107,90%
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85	35.099.104.000	85	76,00	89,41%	26.324.328.000	28.403.890.922	107,90%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan							85,15%			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan							84,64%			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK ≥ 100%)							4			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0% ≤ IKK < 100%)							8			



Selama Tahun 2024, ada 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 12 (Dua Belas) IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan direncanakan, dan dilaksanakan untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dalam IKK membangun negara sesuai dengan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 : Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan;
2. IKK 1.3 : Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi; dan
3. IKK 1.6 : Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau angkutan umum untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah rit (Km) dan jumlah penumpang (orang) pada kegiatan subsidi operasional keperintisan angkutan jalan di Sumatera Selatan terhadap target yang telah ditetapkan. Rit adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

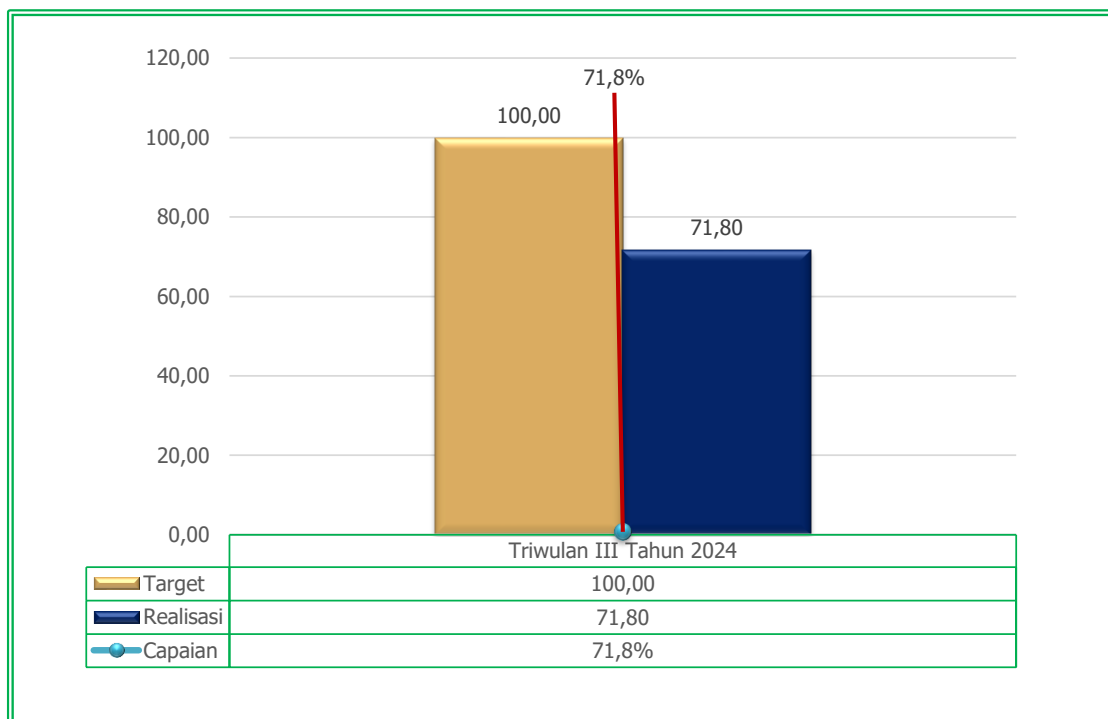
$$\text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi rit pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target rit pada tahun (n)}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Triwulan III sebesar 71,80% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100, maka capaian kinerja mencapai 71,80%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1**. Grafik Capaian IKK persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan.



Gambar II.1. Grafik Capaian IKK1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – DRJD 8317 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024, sebanyak 3 (tiga) trayek ditetapkan untuk dilayani Angkutan Jalan Perintis di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun rute angkutan perintis sebagai berikut:

1. Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cekar;
2. Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung; dan
3. Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi pada Tahun 2024 memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Adapun faktor keberhasilan tercapainya indikator Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum; dan
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi dengan biaya yang terjangkau.

▪ **Faktor Kegagalan**

Adapun faktor kegagalan tercapainya indikator Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional antara lain:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan; dan
3. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional} \\ &= \frac{\text{Jumlah realisasi rit pada Tahun 2024}}{\text{Jumlah target rit pada Tahun 2024}} \end{aligned}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (ritase) dan kebermanfaatan dalam 1 (satu) tahun pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2 Realisasi Rit Keperintisan Angkutan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Trayek	Target Volume (1 Tahun)	Satuan	Total Realisasi s.d. Triwulan III	%
1.	Terminal Simpang Periuk – Simpang 9 Cecar	656	Rit	476	72,6%
2.	Terminal Simpang Periuk – Muara Rupit – Simpang Nibung	666	Rit	481	72,2%
3.	Terminal Simpang Periuk – Karang Dapo – Rawas Ilir.	618	Rit	435	70,4%
Total		1.940	Rit	1.392	71,8%

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumsel (2024)

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1.392}{1.940} \times 100\% = 71,80\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 3.215.165.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 1.782.342.554,- atau mencapai 55,43%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan RPJMN, Renstra serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Terus berupaya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang dilalui oleh rute angkutan keperintisan; dan
4. Melaksanakan monitoring efektifitas pelaksanaan angkutan jalan perintis secara mandiri.

IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Terminal Tipe-A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe-A yang telah selesai dibangun dan telah dioperasikan serta dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Terminal Barang yang beroperasi merupakan terminal barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani angkutan barang di jalan. Jumlah terminal yang dihitung hanya jumlah terminal tipe A,

dikarenakan tidak terdapat terminal barang di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah Terminal Tipe A yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Sumatera Selatan sebanyak 7 (tujuh) lokasi, sebagai berikut:

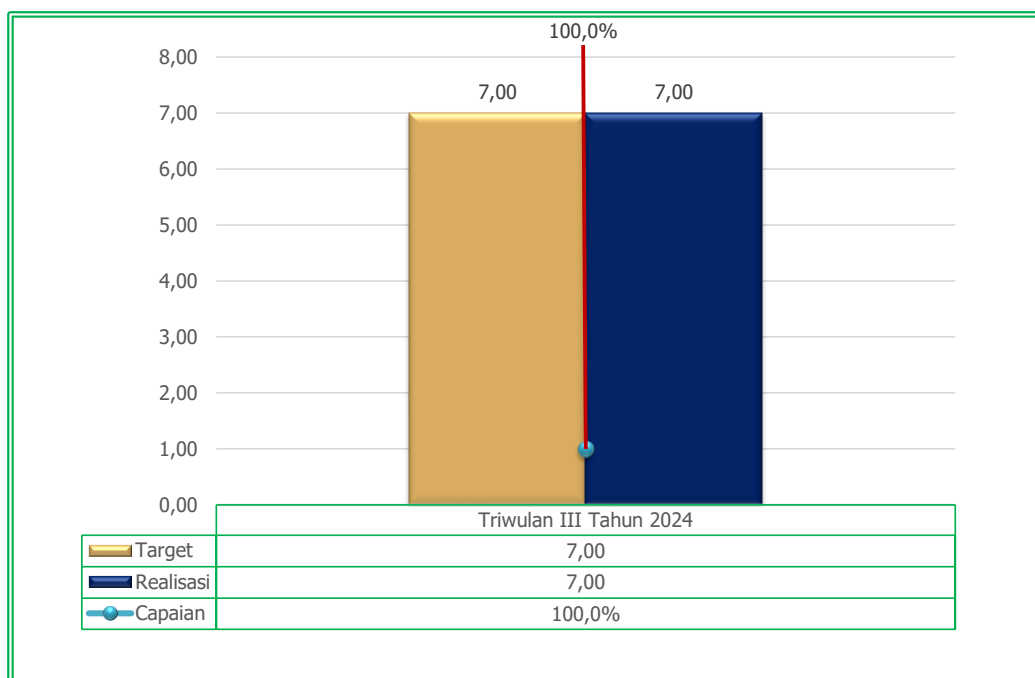
1. Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang);
2. Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang);
3. Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin);
4. Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI);
5. Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU);
6. Terminal Tipe A Batay (Kab. Lahat); dan
7. Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau).

Jumlah Terminal Tipe – A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi pada Tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 7 (tujuh) lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2.** Grafik Capaian IKK Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi.



Gambar II.2. Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PM 20 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan PM 6 Tahun 2023 tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, terhadap Operasional Pelayanan Terminal Tipe-A yang beroperasi pada Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Terminal Tipe A yang dilaksanakan oleh seluruh staf di Terminal Tipe-A berjalan dengan baik;
2. Melakukan evaluasi terkait pelaksanaan manajemen SDM di Terminal Tipe A; dan
3. Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe-A.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 7 (tujuh) lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan pada rapat Renstra BPTD Kelas II Sumatera Selatan 2020-2024.

▪ Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 antara lain yaitu:

1. Tingginya antusias masyarakat untuk menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi ke berbagai media sosial; dan
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat naik dan turun penumpang dan sebagai tempat perpindahan moda.

▪ Faktor Kegagalan

Kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 antara lain yaitu:

1. Fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal belum secara keseluruhan tersedia;
2. Fasilitas umum seperti toilet belum maksimal kebersihannya;
3. Kurang tersedianya air bersih di terminal; dan
4. Lokasi terminal kurang strategis dan berada di lokasi turunan/tanjakan jalan.

- **Realisasi Kinerja**

Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi}}{\text{Realisasi}} = \frac{\text{Target}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah 7 (tujuh) Terminal Tipe A terhadap target yang telah ditetapkan, antara lain:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2024 sebesar Rp. 12.840.287.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 8.544.530.390,- atau mencapai 66,54%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu perencanaan yang komprehensif dalam menentukan alokasi kegiatan operasional Terminal Tipe A sesuai dengan kebutuhan anggaran dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

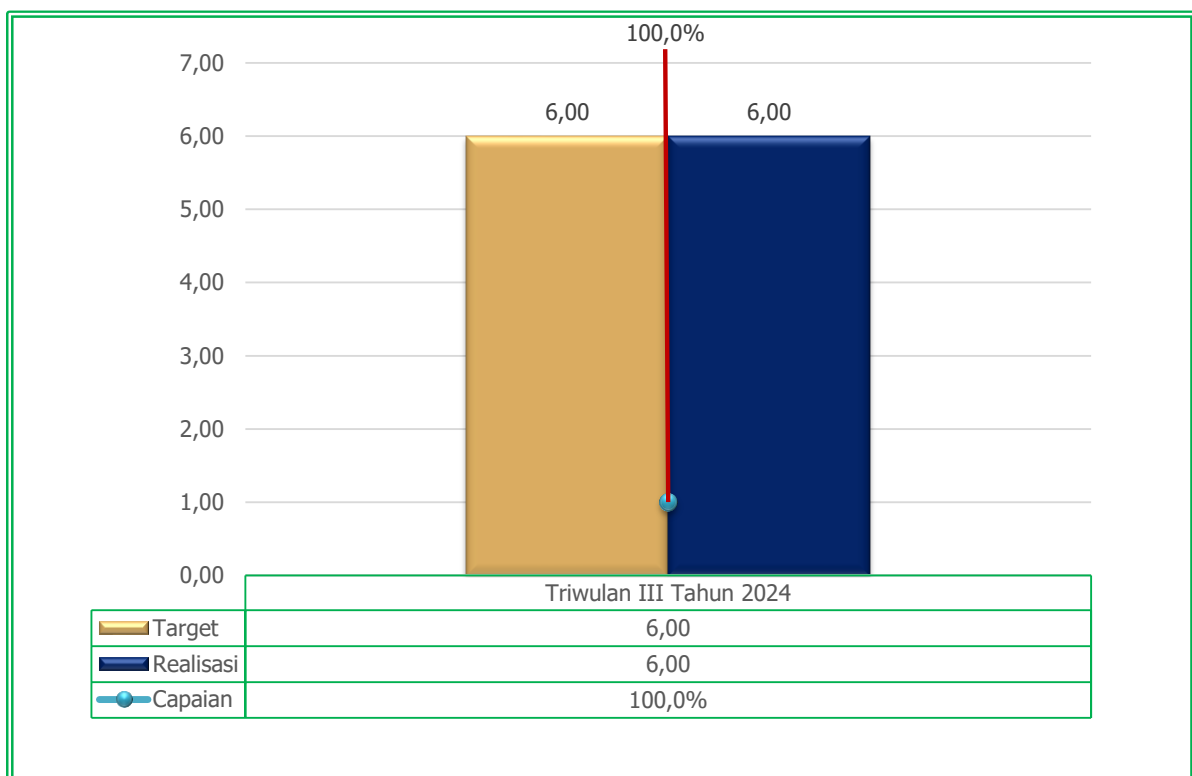
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

$$\text{Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 sebanyak 6 (enam) lokasi, jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 6 (enam) lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3**. Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.



Gambar II.3. Grafik Capaian IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 20 Tahun 2018 dan terakhir diubah melalui PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bahwa BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki 6 (enam) Pelabuhan SDP sebagai berikut:

1. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api (Kabupaten Banyuasin);
2. Pelabuhan Penyeberangan Sri Menanti (Kabupaten Banyuasin);
3. Pelabuhan Sungai Sekayu (Kabupaten Musi Banyuasin);
4. Pelabuhan Sungai 7 Ulu (Kota Palembang);
5. Pelabuhan Sungai Muara Kumbang (Kabupaten Ogan Ilir);
6. Pelabuhan Danau Banding Agung (Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan).

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi antara lain:

1. Petugas di Pelabuhan SDP memiliki kompetensi di bidangnya;
2. Koordinasi yang selalu terjalin dengan instansi/stakeholder terkait;
3. BPTD Kelas II Sumatera Selatan selalu melaksanakan monitoring pelaksanaan operasional di Pelabuhan SDP.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi antara lain:

1. Kurangnya SDM di Pelabuhan SDP;
2. Adanya kondisi alam seperti pasang air laut, cuaca dan ombak yang tinggi; dan
3. Belum tersedianya fasilitas yang lengkap di Satuan Pelayanan Pelabuhan SDP.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\text{Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{ (dalam satuan lokasi)}$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 6 (enam) Lokasi sebagaimana PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, sehingga realisasi Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi saat ini sebanyak 6 (enam) Lokasi dan telah memenuhi target sesuai dengan PK Tahun 2024.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{6 \text{ Lokasi}}{6 \text{ Lokasi}} \times 100\% = 100\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar Rp. 4.112.548.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 2.529.763.701,- atau mencapai 61,51%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang antara lain:

1. percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran setiap bulan untuk keperluan operasional pelabuhan;
2. perencanaan yang komprehensif dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan waktu penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dengan memperhatikan RPJMN dan Renstra.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan meningkatnya pelayanan transportasi darat diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A;

IKK 2.2 : Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A; dan

IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dari 6 (enam) indikator jenis pelayanan di 7 (tujuh) Terminal Tipe-A di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan aspek penilaian sebagai berikut.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe – A} \\ & = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A} \end{aligned}$$

Tabel II.3 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Keselamatan, Keamanan dan Kehandalan/Keteraturan)

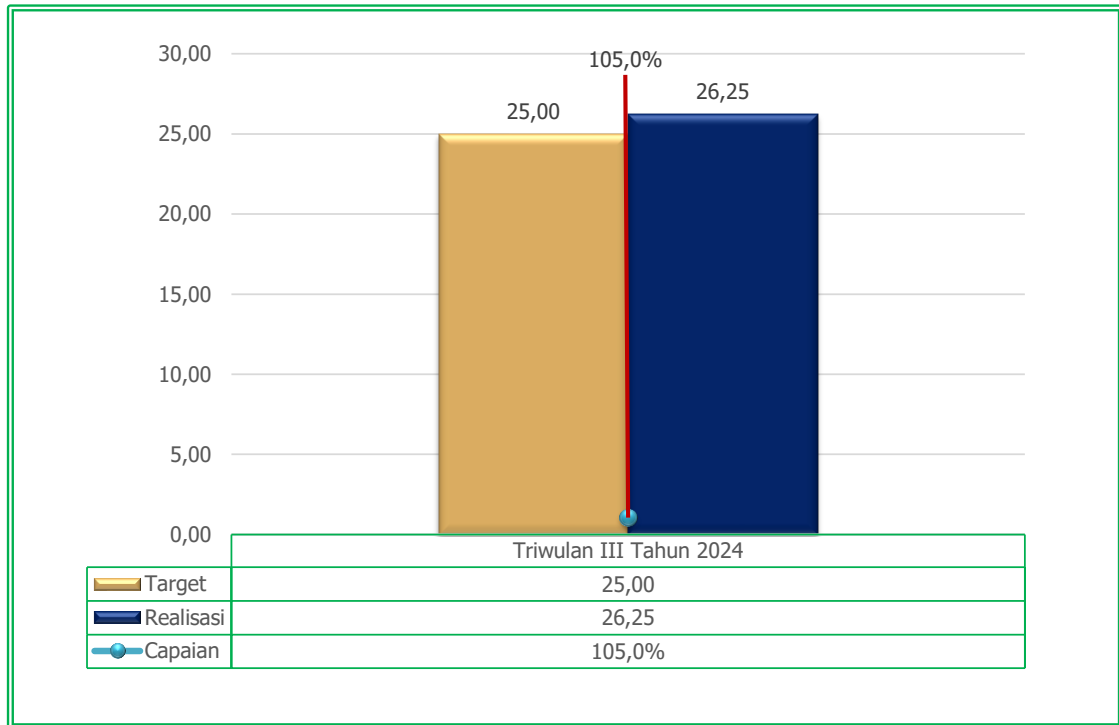
No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
1. Keselamatan				
a	Lajur Pejalan Kaki	Lajur Pejalan Kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan crossing dengan kendaraan bermotor
b	Fasilitas Keselamatan Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan (rambu, marka, penerangan jalan, pagar)	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Keselamatan Jalan rambu marka penerangan jalan pagar
c	Jalur Evakuasi	Jalur evakuasi	Ketersediaan	Tersedia jalur evakuasi
d	Alat Pemadam Kebakaran	Alat pemadam kebakaran	Ketersediaan	Tersedia alat pemadam kebakaran
e	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas Kesehatan Pos Fasilitas, dan Petugas kesehatan
f	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia pos fasilitas, dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum
g	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum	Ketersediaan	Tersedia fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum
h	Informasi fasilitas keselamatan	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan)	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas keselamatan, petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah terlihat dengan jelas
i	Informasi fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dengan jelas
j	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Informasi ketersediaan fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor	Ketersediaan	Tersedia informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor yang mudah terlihat dengan jelas
2. Keamanan				
a	Fasilitas Keamanan	Fasilitas pencegah tindak kriminal	Ketersediaan	Tersedia pos keamanan kamera pengawas, dan titik pengamanan tertentu
b	Media pengaduan gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat	Ketersediaan	Tersedia stiker pada tempat yang strategis, mudah terlihat dan jelas terbaca
c	Petugas Keamanan	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi jasa pengguna jasa	Ketersediaan petugas	Minimal 2 (dua) petugas berseragam dan mudah terlihat
3. Kehandalan/Keteraturan				
a	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis
b	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis	Ketersediaan Keteraturan	Tersedianya jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis
c	Loket penjualan tiket	Loket tempat calon penumpang membeli tiket	Ketersediaan Keteraturan	Loket penjualan tiket tetap dan teratur
d	Kantor Penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal	Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal	Ketersediaan luas	Tersedia kantor penyelenggara terminal control room , dan SIM terminal Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai
e	Petugas Operasional Terminal	Petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal	Ketersediaan Keteraturan	Tersedia petugas Operasional Terminal yang mengatur operasional terminal

Tabel II.4 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Terminal Tipe A
(Aspek Kenyamanan, Kemudahan/Keterjangkauan dan Kesenjajaran)

No.	Jenis Pelayanan	Uraian	Indikator	Tolok Ukur Indikator
4. Kenyamanan				
a	Ruang Tunggu	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	Ketersediaan	Tersedia tempat duduk
			Kondisi	Area Bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal
			Keteraturan	dilakukan kanalisasi penumpang, dan diklasifikasikan berdasarkan zona
b	Toilet	Tersedianya Toilet	Jumlah	Pria (4 Urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel) Wanita (6 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel)
			Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
c	Fasilitas peribadatan/mushola	Fasilitas untuk melakukan ibadah	Luas	Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)
			Kondisi	Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal
d	Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka hijau disediakan untuk area penghijauan	Ketersediaan	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan
			Luas	Terdapat alat-alat kebersihan, penyiraman taman
			Kondisi	Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah
e	Rumah makan	Rumah makan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan
f	Fasilitas dan petugas kebersihan	Fasilitas dan petugas kebersihan	Ketersediaan	Tersedia fasilitas dan petugas kebersihan
g	Tempat istirahat awak kendaraan	Tempat istirahat awak kendaraan	Ketersediaan	Tempat istirahat awak kendaraan
h	Area merokok (<i>smoking area</i>)	Tempat khusus untuk merokok	Ketersediaan	Tersedia <i>smoking area</i>
i	Drainase	Drainase yang memadai	Ketersediaan	Tersedia drainase yang memadai
j	Area dengan jaringan internet (<i>hotspot area</i>)	Area yang tersedia jaringan internet (<i>hotspot area</i>)	Ketersediaan	Tersedia <i>hotspot area</i>
k	Ruang Baca (<i>reading corner</i>)	Ruang Baca (<i>reading corner</i>)	Ketersediaan	Tersedia ruang baca (<i>reading corner</i>)
l	Lampu penerangan ruangan	Lampu penerangan ruangan	Ketersediaan	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi
5. Kemudahan/Keterjangkauan				
a	Letak jalur pemberangkatan	Kapasitas letak jalur pemberangkatan kendaraan	Keteraturan	Letak jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur
				Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
				Tidak boleh terdapat <i>crossing</i> dengan kendaraan lain
b	Letak jalur kedatangan	Kepastian letak kedatangan kendaraan	Keteraturan	Letak jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur
				Terpisah dengan jalur penurunan penumpang
				Tidak boleh terdapat <i>crossing</i> dengan kendaraan lain
c	Informasi pelayanan	Visual : Denah/layout terminal. Nomor trayek, nama PO dan kelas pelayanannya. Nama terminal keberangkatan. Jadwal. Tarif. Peta jaringan	Tempat/ruang	Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca
		Audio : Informasi pelayanan (disebutkan apa saja). Kejadian khusus dan gangguan	Tempat Intensitas Cahaya	Diletakkan di tempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
d	Informasi angkutan lanjutan	Informasi yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat : Jenis angkutan, lokasi angkutan lanjutan, jam pelayanan angkutan lanjutan, jurusan/rute, tarif	Tempat Kondisi	Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca
e	Informasi gangguan perjalanan mobil bus	Fasilitas dalam terminal yang memberikan informasi penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus seperti gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan.	Intensitas suara	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada
f	Tempat penitipan barang	Tempat penitipan barang	Ketersediaan	Tersedia tempat penitipan barang sesuai kebutuhan
g	Fasilitas pengisian baterai (<i>charging corner</i>)	Fasilitas pengisian baterai (<i>charging corner</i>)	Ketersediaan	Fasilitas pengisian baterai (<i>charging corner</i>)
h	Tempat naik/turun penumpang	Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus	Aksesibilitas	Tinggi <i>platform</i> sama dengan tinggi lantai bus
i	Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi	Tempat parkir untuk kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Ketersediaan	Tersedia tempat parkir dengan luas disesuaikan dengan lahan yang tersedia
6. Kesenjajaran				
a	Fasilitas penyandang cacat (difabel)	Fasilitas yang disediakan untuk pengguna jasa difabel	Aksesibilitas	Terdapat ramp portable atau ramp permanen dengan kemiringan maksimum 20° untuk penyambung dari <i>platform</i> ke kendaraan.
				Toilet pengguna difabel
				Kursi roda difabel.
b	Ruang ibu menyusui	Ruangan/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi	Ketersediaan	Tersedia ruang tertutup khusus beserta fasilitas lengkap untuk ibu menyusui dan bayi

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 sebesar 26,25% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 26,25%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4**.



Gambar II. 4. Grafik Capaian IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A yaitu berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup jenis (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pelayanan transportasi darat;
2. Terlaksananya kegiatan monitoring pemenuhan SPM secara berkala di Terminal Tipe A;
3. Terwujudnya aspek pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan pelayanan kesetaraan di Terminal Tipe A dengan melakukan monitoring secara berkala.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A antara lain:

1. Kendala alam seperti asap dari kebakaran hutan menyebabkan jarak pandang yang sulit terlihat jelas di akses keluar masuk kendaraan di Terminal Tipe A;
2. Kurang berkenannya penumpang untuk mengisi kuesioner terkait survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A;
3. Kurang kesadaran penumpang untuk menjaga kebersihan di Lingkungan di Terminal Tipe A, padahal tempat sampah sudah disediakan di setiap sudut di Terminal Tipe A.

▪ **Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 tercapai 26,25% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dimana perolehan 26,25% berasal dari perhitungan jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di 7 (tujuh) Terminal Tipe A terhadap pemenuhan 6 (enam) indikator jenis pelayanan dengan hasil penilaian sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A}$$

▪ Capaian Kinerja

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan sebesar 26,25%. Standar Pelayanan Terminal Penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Terminal Tipe A terhadap 6 (enam) indikator jenis pelayanan di Terminal Tipe-A di Provinsi Sumatera Selatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan penilaian SPM di Terminal Tipe A dengan hasil rekapitulasi nilai (dalam satuan %) sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel II.5 Hasil Penilaian Pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Terminal Tipe A	Nilai Keselamatan (%)	Nilai Keamanan (%)	Nilai Kehandalan / Keteraturan (%)	Nilai Kenyamanan (%)	Nilai Kemudahan / Keterjangkauan (%)	Nilai Kesetaraan (%)	Total Nilai (%)
1	Alang-alang Lebar	37,00	21,00	51,00	58,00	26,00	0,00	32,17
2	Karya Jaya	23,00	11,00	51,00	50,00	26,00	0,00	26,83
3	Betung	16,50	5,56	50,00	56,70	40,70	0,00	28,24
4	Kayu Agung	20,00	6,00	41,00	31,00	35,00	0,00	22,17
5	Batu Kuning	16,00	6,00	35,00	38,00	27,00	0,00	20,33
6	Batai	10,00	6,00	35,00	40,00	28,00	0,00	19,83
7	Simpang Periuk	22,10	3,33	70,00	65,00	44,40	0,00	34,14
Nilai Rata-rata								26,25

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar Rp. 869.696.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 525.895.000,- atau mencapai 60,46%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas di Terminal Tipe-A;
2. Melakukan upaya peningkatan secara berkelanjutan terhadap 6 (enam) aspek di Terminal Tipe A yaitu (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan

- kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan;
3. Melaksanakan pelayanan di Terminal Tipe A sesuai dengan SPM; dan
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A.

IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A merupakan perbandingan antara persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang melaporkan data operasional terminal secara *online* (bobot 50%) ditambah dengan persentase jumlah Terminal Tipe A yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang berada di Terminal Tipe A dapat berupa *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

Persentase Terminal Tipe A Online

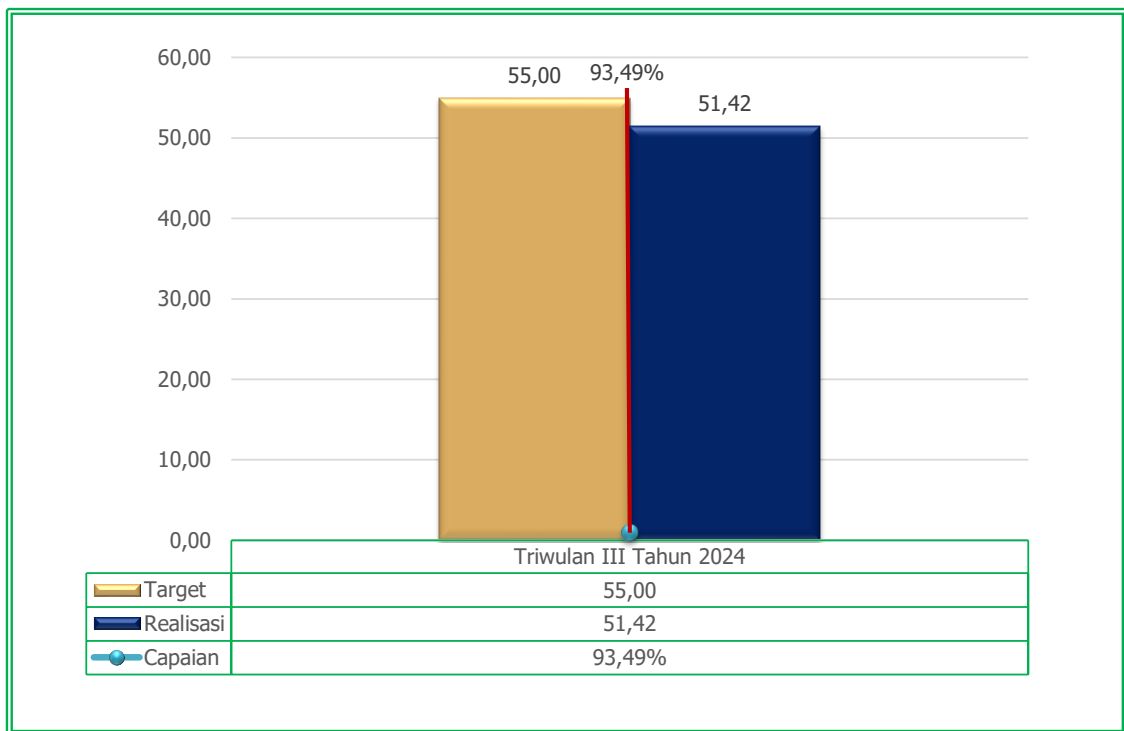
$$= \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe – A

$$= (\text{Persentase Terminal Tipe A yang melaporkan data operasional online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase jumlah TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2023

Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 sebesar 51,42% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 55%, maka capaian kinerja mencapai 93,49%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**.



Gambar II. 5. Grafik Capaian IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan pada Pasal 68 terkait Sistem Informasi Manajemen Terminal bahwa pemantauan kegiatan terminal yang diintegrasikan pada pusat data yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Selain itu, Penerapan SMART Terminal Tipe A dilengkapi dengan perangkat digitalisasi berupa *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 55% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan pemantauan data operasional di Terminal Tipe A; dan

2. Tersedianya perangkat digitalisasi di Terminal Tipe A untuk mendukung pelaporan data operasional terminal secara *online*.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A antara lain:

1. Kurangnya pemahaman SDM dalam melaksanakan pelaporan data operasional; dan
2. Belum teralokasinya anggaran penyediaan perangkat digitalisasi di seluruh Terminal Tipe A.

▪ **Realisasi Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2024 tercapai 51,42% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Persentase TTA online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A dihitung berdasarkan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara *online* (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 6 (enam) item, yaitu: *vending machine*, *passenger barrier gate*, *vehicle barrier gate*, *CCTV*, *counting passenger*, *information display*.

Berdasarkan kondisi eksisting di lapangan bahwa 7 (tujuh) terminal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan meliputi Terminal Tipe A Alang-alang Lebar (Kota Palembang), Terminal Tipe A Karya Jaya (Kota Palembang), Terminal Tipe A Betung (Kab. Banyuasin), Terminal Tipe A Kayu Agung (Kab. OKI), Terminal Tipe A Batu Kuning (Kab. OKU), Terminal Tipe A Batai (Kab. Lahat), Terminal Tipe A Simpang Periuk (Kota Lubuklinggau) telah melaporkan pelaksanaan operasionalnya berupa data produksi secara *online* yang dilaporkan melalui *website* SIASATI (Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia) <https://siasati.dephub.go.id/login>. Selain itu pelaporan data produksi Terminal Tipe A juga direkapitulasi oleh admin internal BPTD Kelas II Sumatera Selatan melalui link *dashboard*

aplikasi [lookerstudio.google.com](https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/713ec446-cf34-4a5a-bef6-603b16ecb7d9/page/p_nd56u4rywc) (https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/713ec446-cf34-4a5a-bef6-603b16ecb7d9/page/p_nd56u4rywc), sehingga diperoleh bobot persentase sebesar 50%. Untuk persentase Terminal Tipe A (TTA) yang telah dipasang perangkat digitalisasi ditentukan bobot 50%, dimana masing-masing pemenuhan 6 (enam) item perangkat digitalisasi terminal ditentukan persentase aspek penilaian bobotnya sebagai berikut:

Tabel II. 6 Aspek Penilaian Penerapan *SMART* Terminal Tipe A

NO	ASPEK PENILAIAN	BOBOT (%)
1	<i>Vending Machine</i>	20%
2	<i>Passenger Barrier Gate</i>	20%
3	<i>Vehicle Barrier Gate</i>	20%
4	<i>CCTV</i>	10%
5	<i>Counting Passenger</i>	10%
6	<i>Information Display</i>	20%

Sumber: Analisa BPTD Sumsel (2023)

Berdasarkan tabel di atas bahwa dari 7 (tujuh) terminal yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 1 (satu) terminal yang telah memenuhi aspek penilaian *SMART* terminal yaitu Terminal Tipe A Alang-alang Lebar dan Terminal Tipe A Karya Jaya, dimana aspek penilaian pemenuhan perangkat digitalisasi berupa CCTV (prosentase 10%) yang terpasang di Terminal Tipe A Alang-alang Lebar dan Terminal Tipe A Karya Jaya sehingga diperoleh total bobot sebesar 10%. Untuk itu total keseluruhan capaian IKK Persentase Penerapan *SMART* Terminal Tipe-A Tahun 2024 diperoleh hasil sebesar 51,42% dengan perumusan secara terperinci sebagai berikut:

$$IKK\ 2.2 = (Persentase\ TTA\ online \times 50\%) + \left(\frac{Persentase\ TTA\ yang\ telah\ dipasang}{perangkat\ digitalisasi\ Terminal} \times 50\% \right)$$

$$IKK\ 2.2 = \left(\frac{7}{7} \times 50\% \right) + \left(\frac{10\% (bobot\ aspek\ penilaian)}{100\% (total\ bobot\ aspek\ penilaian)} \times \frac{2}{7} \times 50\% \right)$$

$$IKK\ 2.2 = (50\%) + (1,42) = 51,42\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran Persentase Penerapan *SMART* Terminal Tipe A memiliki alokasi keuangan sebesar Rp. 4.804.217.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 3.218.035.582,- atau mencapai 66,98%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan peningkatan dan perbaikan Sistem Informasi Manajemen di Terminal Tipe A secara digital;
2. Penyediaan perangkat digitalisasi yang lengkap di Terminal Tipe A untuk mendukung pelaksanaan pelaporan data operasional secara *online* dan *real time*; dan
3. Peningkatan kualitas SDM khususnya di bidang IT untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen di Terminal Tipe A.

IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Penumpang di Pelabuhan Penyeberangan paling sedikit meliputi (1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan total nilai (*score*) yang diperoleh dari masing-masing pemenuhan 6 (enam) aspek pelayanan di Pelabuhan SDP di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} \\ & = \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP} \end{aligned}$$

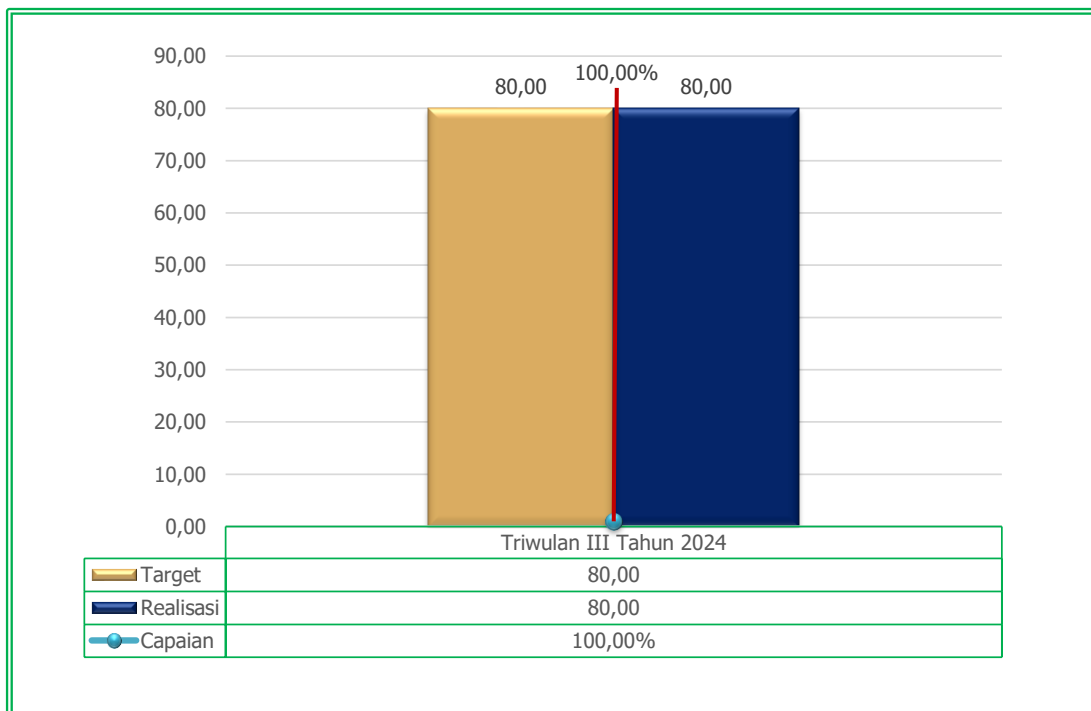
Tabel II.7 Aspek Penilaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP

NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT
A.	Pelayanan Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan	
A.1.	PELAYANAN DI TERMINAL PENUMPANG	
1	KESELAMATAN	3,00%
2	KEAMANAN	3,00%
3	KENYAMANAN	3,00%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,00%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,00%
6	KESETARAAN	3,00%
A.2.	PELAYANAN RUANG TUNGGU	
1	KESELAMATAN	3,50%
2	KEAMANAN	3,50%
3	KENYAMANAN	3,50%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,50%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,50%
6	KESETARAAN	3,50%
A.3.	Pelayanan di Gangway	
1	KEAMANAN	3,50%
2	KENYAMANAN	3,50%
3	KESETARAAN	3,50%
B.	PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN	
1	KESELAMATAN	6,50%
2	KENYAMANAN	6,50%
3	KEHANDALAN KETERATURAN	6,50%
C.	Pelayanan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan	
C.1.	KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG	
1	KESELAMATAN	2,40%
2	KEAMANAN	2,40%
3	KENYAMANAN	2,40%
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,40%
5	KEHANDALAN KETERATURAN	2,40%
C.2.	KENDARAAN DI LOKET	
1	KENYAMANAN	2,50%
2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,50%
3	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%
C.3.	KENDARAAN DI PARKIR TUNGGU	
1	KENYAMANAN	2,50%
2	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%
C.4.	KENDARAAN DI PARKIR SIAP MUAT	
1	KENYAMANAN	3,25%
2	KEHANDALAN KETERATURAN	3,25%
Total		100,00%

Sumber : Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6**.



Gambar II. 6. Grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, dimana mencakup 6 (enam) 1) keselamatan, (2) keamanan, (3) kehandalan/keteraturan, (4) kenyamanan, (5) kemudahan/keterjangkauan, (6) kesetaraan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian kinerja terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah dalam kegiatan peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan dengan adanya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal keberangkatan di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap ketepatan jadwal di lapangan;
3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal; dan
4. Memberikan sanksi tegas dan memberikan efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dalam mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP, antara lain:

1. Pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan; dan
2. Pelaksanaan pemenuhan SPM kapal penyeberangan dan SPM pelabuhan penyeberangan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP antara lain:

1. Kendala cuaca ekstrim seperti gelombang tinggi dan musim penghujan, sehingga dapat menghambat kegiatan tersebut;
2. Kurangnya pemahaman pengguna jasa tentang keselamatan dan ketertiban selama melakukan perjalanan dalam menggunakan angkutan penyeberangan; dan
3. Masih adanya kendaraan ODOL (*Over Dimension and Over Loading*) yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberangan, sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 80% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP} \\ &= \text{Jumlah Persentase Pembobotan Pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP} \end{aligned}$$

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diperoleh dari jumlah persentase pembobotan pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP yang dilaksanakan di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api. Berdasarkan hasil survey pelaksanaan SPM di Pelabuhan Tanjung Api-api diperoleh *total score* dari pemenuhan aspek Standar Pelayanan Minimum sebesar 80% dengan tingkat pelayanan minimum kategori B (Baik) sebagaimana tabel konversi sebagai berikut.

Tabel II.8 Hasil Penilaian Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP Triwulan III Tahun 2024

NO	URAIAN PELAYANAN	BOBOT	Surveyor	
			SCORE	TOTAL SCORE
A.	Pelayanan Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan			
A.1.	PELAYANAN DI TERMINAL PENUMPANG			14
1	KESELAMATAN	3,00%	1,00	
2	KEAMANAN	3,00%	2,25	
3	KENYAMANAN	3,00%	2,75	
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,00%	1,75	
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,00%	3,00	
6	KESETARAAN	3,00%	3,00	
A.2.	PELAYANAN RUANG TUNGGU			14
1	KESELAMATAN	3,50%	0,88	
2	KEAMANAN	3,50%	3,50	
3	KENYAMANAN	3,50%	2,19	
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	3,50%	1,75	
5	KEHANDALAN KETERATURAN	3,50%	3,50	
6	KESETARAAN	3,50%	2,63	
A.3.	Pelayanan di Gangway			11
1	KEAMANAN	3,50%	3,50	
2	KENYAMANAN	3,50%	3,50	
3	KESETARAAN	3,50%	3,50	
B.	PELAYANAN KAPAL DI PELABUHAN PENYEBERANGAN			13
1	KESELAMATAN	6,50%	-	
2	KENYAMANAN	6,50%	6,50	
3	KEHANDALAN KETERATURAN	6,50%	6,50	
C.	Pelayanan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan			
C.1.	KENDARAAN DI JEMBATAN TIMBANG			10
1	KESELAMATAN	2,40%	-	
2	KEAMANAN	2,40%	2,40	
3	KENYAMANAN	2,40%	2,40	
4	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,40%	2,40	
5	KEHANDALAN KETERATURAN	2,40%	2,40	
C.2.	KENDARAAN DI LOKET			8
1	KENYAMANAN	2,50%	2,50	
2	KEMUDAHAN KETERJANGKAUAN	2,50%	2,50	
3	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%	2,50	
C.3.	KENDARAAN DI PARKIR TUNGGU			5
1	KENYAMANAN	2,50%	2,50	
2	KEHANDALAN KETERATURAN	2,50%	2,50	
C.4.	KENDARAAN DI PARKIR SIAP MUAT			7
1	KENYAMANAN	3,25%	3,25	
2	KEHANDALAN KETERATURAN	3,25%	3,25	
Total		100,00%		80
Total			Tingkat Pelayanan Minimum Baik	

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Tabel II.9 Konversi Nilai Pelayanan Standar Pelayanan Minimum di Pelabuhan SDP

Konversi Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
0 - 29	E	Buruk
30 -50	D	Kurang
51 - 69	C	Cukup
70 - 85	B	Baik
86 - 100	A	Baik Sekali

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 17.500.000,- atau mencapai 50,0%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai, danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan keselamatan, keamanan dan ketertiban di Pelabuhan SDP;
3. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kapal;
4. Melaksanakan pelayanan di Pelabuhan SDP sesuai dengan SPM; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

IKK 3.1 : Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;

IKK 3.2 : Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat;

IKK 3.5 : Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;

IKK 7a : Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

1. Rambu Lalu Lintas;
2. Marka Jalan;
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
4. Alat Penerangan Jalan;
5. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
6. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
7. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
8. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Indikator Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
 = Jumlah persentase pembobotan item perlengkapan jalan yang terpasang di Prov. Sumsel pada tahun n

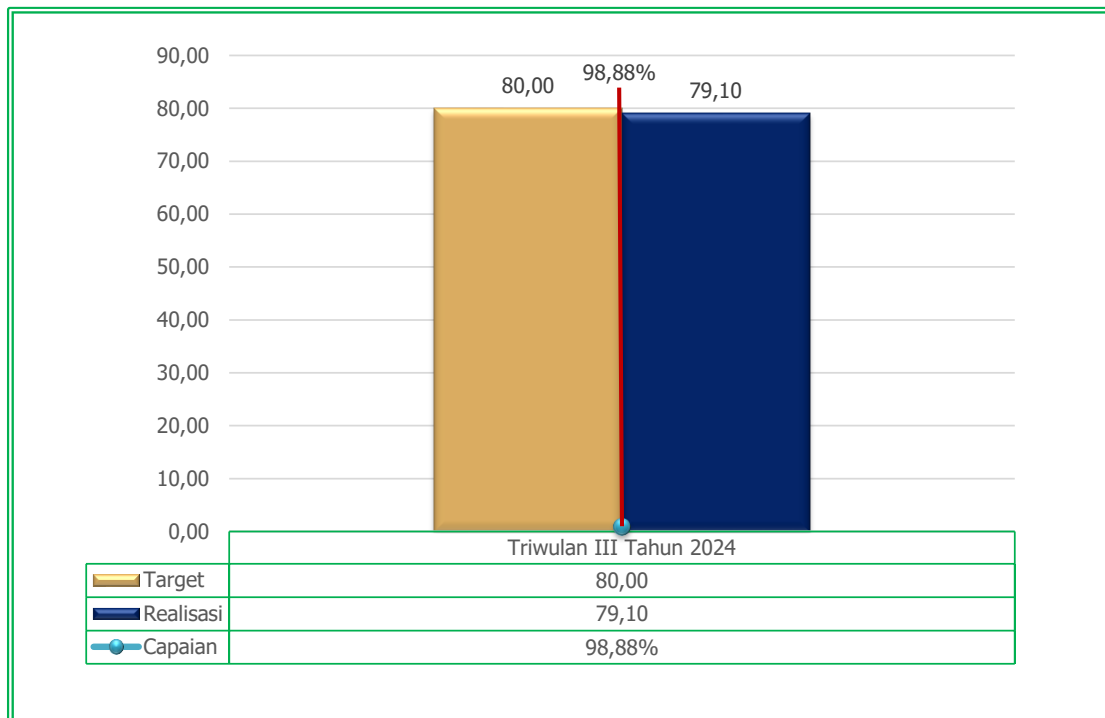
Tabel II.10 Asumsi Pembobotan Pemenuhan Item Perlengkapan Jalan

NO	ITEM PERLENGKAPAN JALAN	BOBOT (%)
1	Marka Jalan	10%
2	Rambu Lalu Lintas	10%
3	Patok Lalu Lintas	10%
4	Paku Jalan	10%
5	Pagar Pengaman Jalan	10%
6	Alat Penerangan Jalan	10%
7	Lampu Peringatan Pemakai Jalan	10%
8	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	10%
9	Cermin Tikungan	10%
10	Pembatas Lalu Lintas	10%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2024 sebesar 79,10% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 98,88%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**.



Gambar II.7. Grafik Capaian IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 80% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal antara lain:

1. Terpenuhinya item fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang sesuai dengan spesifikasi teknis perlengkapan jalan;
2. Pekerjaan pemasangan perlengkapan jalan terlaksana tepat waktu; dan
3. Alokasi anggaran perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan seperti cuaca kurang baik;
2. Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
3. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perlengkapan jalan.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 79,10%.

Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
= Jumlah persentase pembobotan item perlengkapan Jalan yang terpasang di Prov.Sumsel pada tahun n

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 79,10%, dimana pada Triwulan III Tahun 2024 jumlah realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 184.601 dengan target sebesar 233.277 meliputi Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, Patok Lalu Lintas, Paku Jalan, Lampu Peringatan Pemakai Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 79,10% sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel II. 11 Realisasi Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang
Pada Triwulan III Tahun 2024

NO	ITEM PERLENGKAPAN JALAN	BOBOT (%)	JUMLAH TARGET KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN TAHUN 2024	JUMLAH REALISASI PERLENGKAPAN JALAN YANG TELAH TERPASANG TAHUN 2024	% CAPAIAN TRIWULAN I	% CAPAIAN TRIWULAN II	% CAPAIAN TRIWULAN III	KET.
1	Marka Jalan	10%	225.152	178.076	0%	8%	7,9%	Terpasang
2	Rambu Lalu Lintas	10%	220	220	0%	10%	10,0%	Terpasang
3	Patok Lalu Lintas	10%	800	100	0%	2%	1,3%	Terpasang
4	Paku Jalan	10%	6.200	6.200	0%	10%	10,0%	Terpasang
5	Pagar Pengaman Jalan	10%	900	0	0%	0%	0,0%	Terpasang
6	Alat Penerangan Jalan	10%	0	0	0	0	0,0%	Tidak Ada/Tidak Terpasang
7	Lampu Peringatan Pemakai Jalan	10%	4	4	0%	10%	10,0%	Terpasang
8	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	10%	1	1	0%	10%	10,0%	Terpasang
9	Cermin Tikungan	10%	0	0	0	0	0,0%	Tidak Ada/Tidak Terpasang
10	Pembatas Lalu Lintas	10%	0	0	0	0	0,0%	Tidak Ada/Tidak Terpasang
Jumlah		100%	233.277	184.601	0%	50%	79,1%	

Sumber: Data Diolah BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Kondisi Ideal Tahun 2024 sebesar Rp. 24.115.850.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 17.532.558.034,- atau mencapai 72,70%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang antara lain:

- Melaksanakan monitoring / pengawasan kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian lokasi pemasangan dengan kebutuhan perlengkapan jalan di lapangan;
- Melakukan perencanaan yang komprehensif terkait waktu pemasangan perlengkapan jalan dan alokasi kebutuhan anggaran agar sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan; dan
- Merencanakan optimalisasi waktu dan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

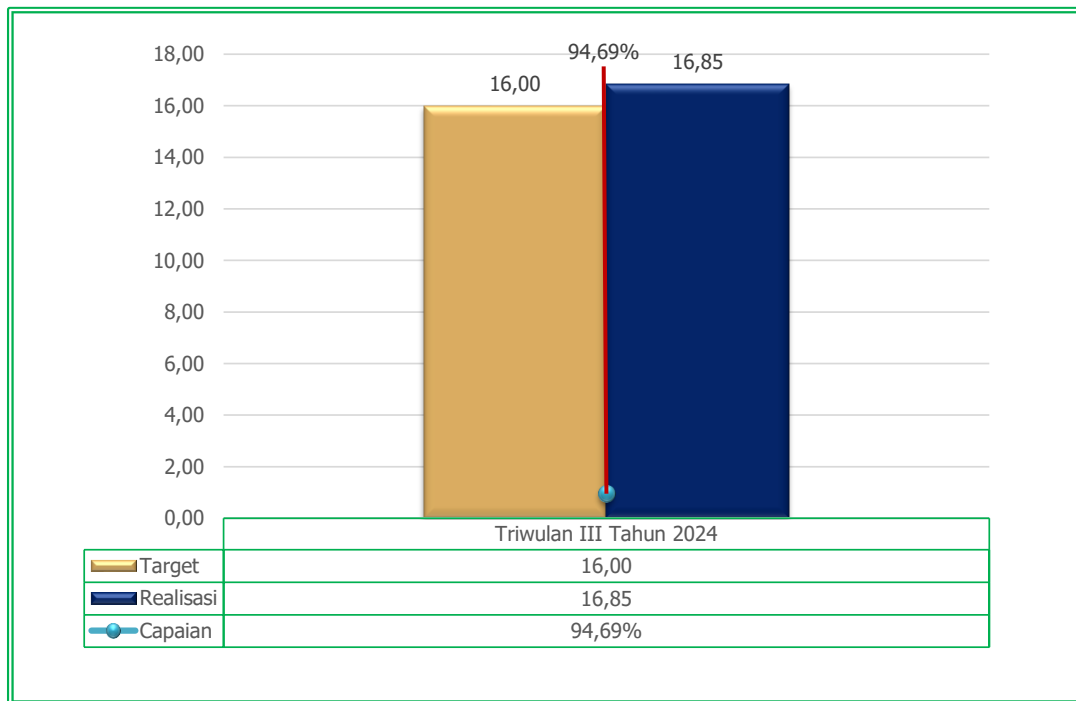
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan persentase perbandingan jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB dengan jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk di UPPKB (UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati). Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran daya angkut, dimensi kendaraan, persyaratan teknis, dokumen kendaraan, tata cara muat, kelas jalan yang tercatat di dalam UPPKB. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor AJ.007/2/17/DRJD/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting, pelanggaran kendaraan angkutan barang adalah pelanggaran terhadap kelebihan muatan yang tercatat di dalam UPPKB. Jumlah pelanggaran di UPPKB dilaporkan per bulan dan persentase pelanggaran per tahun dihitung rata-rata dari persentase pelanggaran per bulan.

$$\text{Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang dilakukan penindakan tilang di UPPKB}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk di UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 16,85% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 16%, maka capaian kinerja mencapai 94,69%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar II.8. Grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ **Dasar Hukum**

Dasar hukum pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan; dan
3. dan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 116 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Atas Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*) dan/atau Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) di Jalan Tol.

▪ **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 16% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya yaitu dengan beroperasinya UPPKB Merapi serta dengan berdasarkan kondisi lapangan, dimana terdapat penambahan 2 (dua) UPPKB yang beroperasi yaitu UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati yang berdampak pada peningkatan pelanggaran kelebihan muatan.

▪ **Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Terlaksanakan kegiatan pengawasan terkait pelanggaran dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*) di UPPKB;
2. Terlaksanakan kegiatan penegakan hukum pada angkutan barang yang melakukan pelanggaran dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*) di UPPKB; dan
3. Terlaksanakan kegiatan sosialisasi dimensi dan muatan angkutan ODOL (*over dimension and over loading*) kepada operator angkutan barang untuk mengurangi ODOL di jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya pemahaman operator angkutan barang dan pengemudi terkait ketentuan dimensi dan muatan (*over dimension and over loading*); dan
2. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam melaksanakan penegakan hukum terkait ODOL (*over dimension and over loading*).

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 berdasarkan data pelanggaran di UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati sebagai berikut:

Tabel II. 12 Realisasi Data Pelanggaran Kelebihan Muatan di UPPKB Merapi, UPPKB Talang Kelapa dan UPPKB Kertapati Triwulan III Tahun 2024

TRIWULAN I								
Januari 2024			Februari 2024			Maret 2024		
A	B	% (A / B)	A	B	% (A / B)	A	B	% (A / B)
3140	9911	32%	2236	10742	21%	1129	7319	15%
TRIWULAN II								
April 2024			Mei 2024			Juni 2023		
A	B	% (A / B)	A	B	% (A / B)	A	B	% (A / B)
323	1976	16%	473	2446	19%	946	30639	3%
TRIWULAN III								
Juli 2024			Agustus 2024			September 2024		
A	B	% (A / B)	A	B	% (A / B)	A	B	% (A / B)
1092	5964	18%	726	5043	14%	245	2005	12%

Sumber: Data Diolah Dari UPPKB (2024)

Pelanggaran kelebihan muatan di UPPKB berdasarkan tabel di atas diperoleh rata-rata pelanggaran sampai dengan Triwulan III sebesar 16,85%, dimana dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 16%.

$$\text{Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

▪ Capaian Kinerja

Persentase capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk. Berdasarkan realisasi data kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat diperoleh hasil capaian sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(16 - (16,85 - 16))}{16} \times 100\% = 94,69\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Adapun anggaran terkait Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar Rp. 4.274.289.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 2.851.948.411,- atau mencapai 66,72%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan bidang sarana dan prasarana perhubungan darat;
2. Melaksanakan inspeksi keselamatan LLAJ atau *rampcheck* angkutan;
3. Melaksanakan penegakan hukum angkutan dengan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait; dan
4. Melaksanakan sosialisasi ODOL (*over dimension and over loading*) kepada perusahaan dan *driver* angkutan.

IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

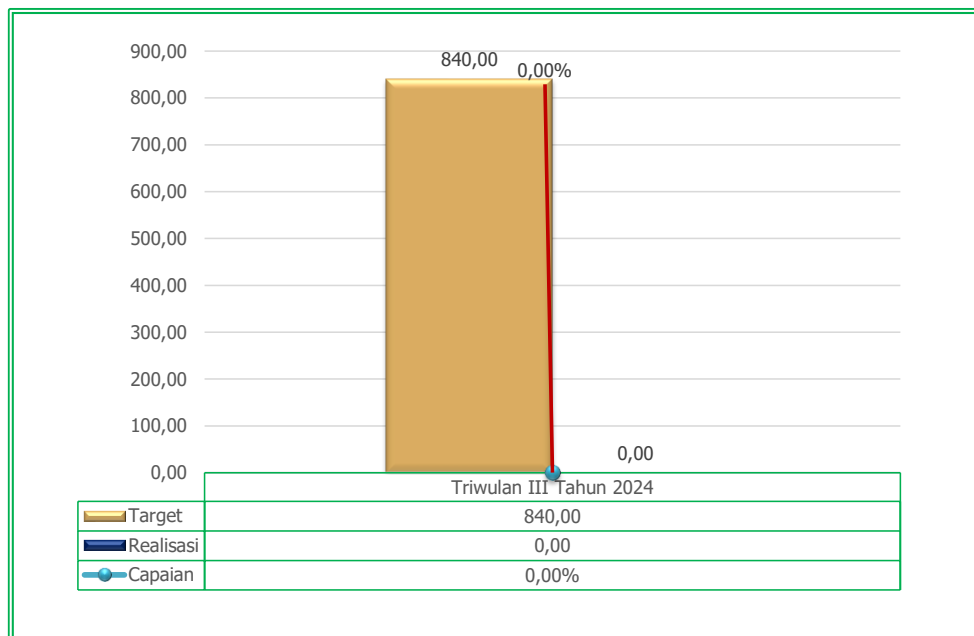
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat). Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan
 = Realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada tahun n
 (dalam satuan orang)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 0 (nol) orang jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 1300 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada

Gambar II.9



Gambar II.9. Grafik Capaian IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan yaitu pada Pasal 208 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terkait Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b terkait Sosialisasi dan Internalisasi Tata Cara dan Etika Berlalu Lintas serta Program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 840 orang yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan pada adanya peningkatan jumlah masyarakat yang menjadi target kegiatan sosialisasi keselamatan di jalan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Menurunnya angka terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan;
2. Terwujudnya Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap tahun;

3. Petugas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Pelabuhan SDP dan UPPKB, operator angkutan serta pengguna jasa angkutan memahami terkait informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan antara lain:

1. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan secara dalam kurun waktu yang singkat dikarenakan tidak tersampainya informasi terkait keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Meningkatnya jumlah pelanggaran kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas di jalan seperti tidak menggunakan helm dan *safety belt*; dan
3. Petugas di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, Pelabuhan SDP dan UPPKB, kurang kompeten dalam menyampaikan informasi keselamatan lalu lintas di jalan kepada pengguna jasa angkutan umum.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

= Realisasi jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan pada tahun n

▪ **Capaian Kinerja**

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 0 (nol) orang dikarenakan kegiatan Pekan Keselamatan Jalan sampai dengan Triwulan III belum berjalan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV yaitu pada Bulan Oktober 2024, sehingga capaian kinerja masih 0 (nol).

Capaian Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

= 0 orang

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar Rp. 350.000.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0,00%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala yaitu ke operator angkutan, pengguna jasa angkutan umum serta anak usia dini; dan
2. Mengalokasikan kebutuhan anggaran sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala minimal setiap tahun.

IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

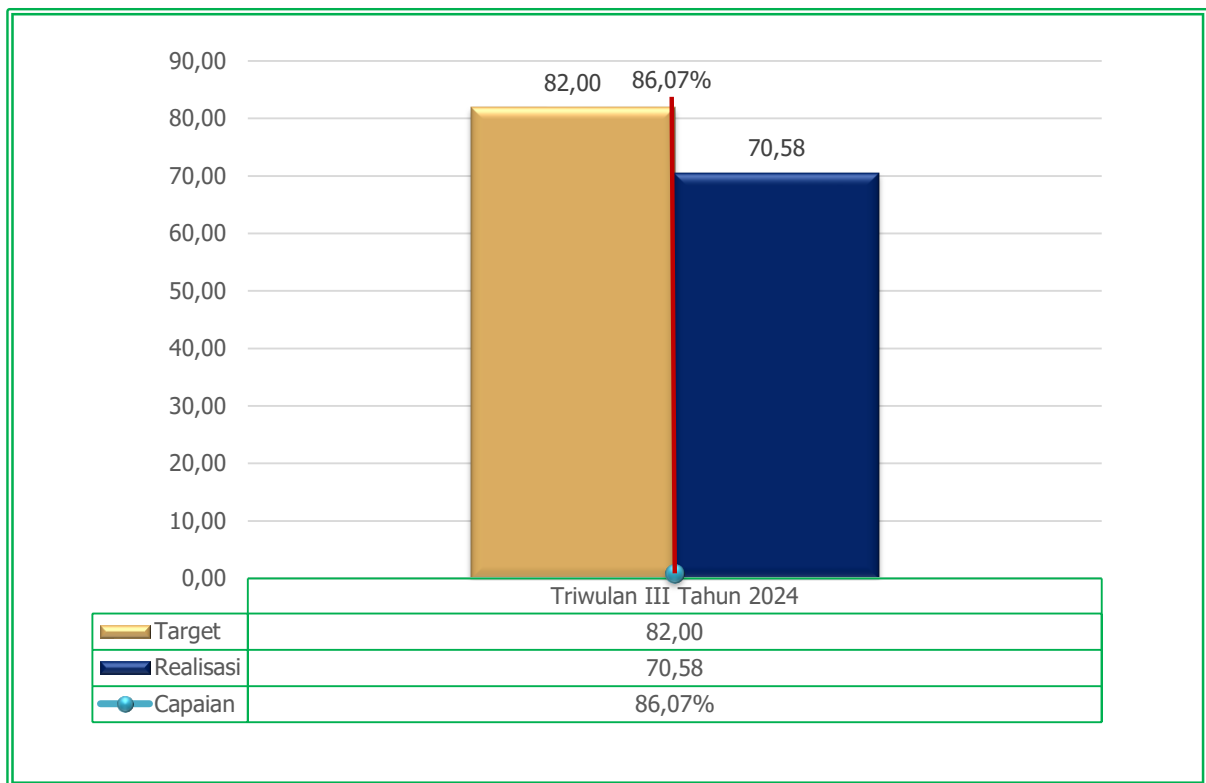
Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dinilai berdasarkan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang merupakan pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala dilaksanakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk pelaksanaan Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang menjadi tugas dan fungsi BPTD pada implementasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pelaksanaan kalibrasi alat uji yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan rumus perhitungan indikator sebagai berikut:

IKK 7a

$$= \frac{\text{Jumlah Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel yang telah memiliki UPUBKB terakreditasi}}{\text{Jumlah total Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar 70,58% jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 82%, maka capaian kinerja mencapai 86,07%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.10**.



Gambar II.10. Grafik Capaian IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhadap keselamatan transportasi darat memiliki target 82% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Permintaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Kelengkapan alat uji yang akan dilakukan kalibrasi; dan
3. Peralatan yang akan diuji sudah memiliki standar teknis.

▪ **Faktor Kegagalan**

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor antara lain:

1. Tidak memiliki gedung pengujian kendaraan bermotor;
2. Tidak lengkapnya alat yang akan diuji; dan
3. Ketidakmampuan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk memenuhi fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

▪ **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 70,58% dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

IKK 7a

$$= \frac{\text{Jumlah Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel yang telah memiliki UPUBKB terakreditasi}}{\text{Jumlah total Pemda Kab/Kota di Prov. Sumsel}} \times 100\%$$

▪ **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 merupakan pelaksanaan akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan, dimana telah dilaksanakan di 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yaitu 1) Kota Palembang, 2) Kabupaten Banyuasin, 3) Kabupaten Musi Banyuasin, 4) Kabupaten Ogan Ilir, 5) Kabupaten Ogan Komering Ilir, 6) Kabupaten Prabumulih, 7) Kabupaten Ogan Komering Ulu, 8) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 9) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 10) Kabupaten Muara Enim, 11) Kota Lubuk Linggau dan 12) Kabupaten Musi Rawas. Untuk kegiatan kalibrasi alat uji pada pengujian kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Sumatera Selatan telah dilaksanakan di 6 (enam) Kabupaten/Kota dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan antara lain 1) Kabupaten Banyuasin, 2) Kabupaten Musi Banyuasin, 3) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 4) Kabupaten Muara Enim, 5) Kabupaten Musi Rawas dan 6) Kabupaten Lahat.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 70,58%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{12}{17} \times 100\% = 70,58\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar Rp. 623.475.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 324.370.218,- atau mencapai 52,02%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Terwujudnya deteksi pencapaian kondisi laik pakai untuk menjamin ketelitian, ketepatan alat ukur/uji dalam rangka peningkatan mutu pelayanan;
2. Melaksanakan monitoring ke Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki akreditasi dan belum melaksanakan kalibrasi alat uji secara berkala;
3. Melakukan pengecekan terhadap alat uji untuk menjamin peralatan tersebut digunakan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan;
4. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dan SOP yang telah ditentukan; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM pengujian kendaraan bermotor melalui bimbingan teknis dan pelatihan lainnya.

Sasaran Strategis 5: SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
IKK 5.1 : Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan aspek penilaian meliputi:

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan; dan
- d) Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum).

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) beserta turunannya (Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi, Monitoring Rencana Aksi), penginputan aplikasi *e-performance* dan dokumen pendukung lainnya.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran. Rumus perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan pembobotan penilaian sebagai berikut:

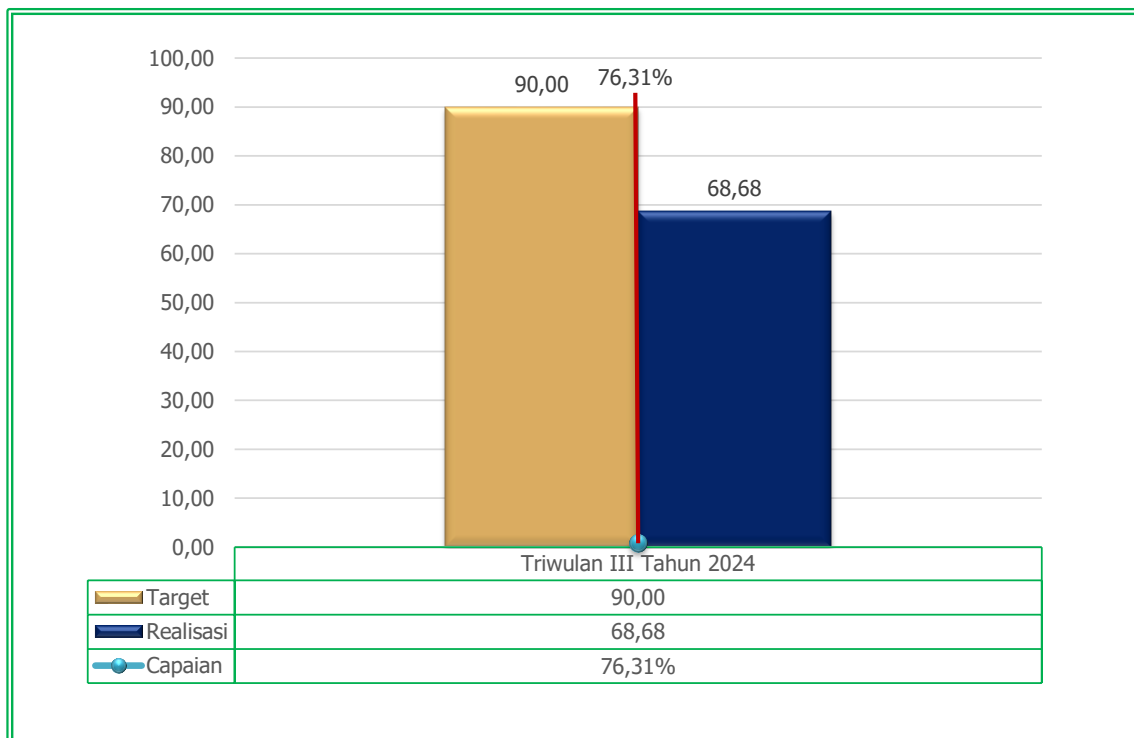
Tabel II.13 Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%
1	<i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</i>	10%
2	<i>Perjanjian Kinerja</i>	5%
3	<i>pengisian input e-planning</i>	5%
4	<i>pengisian input e-performance</i>	5%
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%
1	<i>Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)</i>	6%
2	<i>Kompetensi</i>	10%
3	<i>Kinerja</i>	8%
4	<i>Disiplin</i>	1%
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%
Total Nilai		100%

Sumber: BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. **Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024**

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 memiliki nilai sebesar 68,68 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar dengan nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 76,31%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.11.**



Gambar II.11. Grafik Capaian IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat memiliki target senilai 90,00 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

Penyelenggaraan Kinerja Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan penunjang teknis, antara lain:

1. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan;
2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan;
3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana;
4. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; dan
5. Pengawasan Sarana, Prasarana, Lalu Lintas dan Angkutan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:

1. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang sudah ditentukan;
2. Koordinasi yang baik dengan instansi dan stakeholder terkait saat pelaksanaan kegiatan;
3. SDM yang memiliki integritas yang baik.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat antara lain:

1. Adanya pengurangan anggaran kegiatan;
2. Tidak adanya koordinasi yang terjalin dengan baik dengan instansi dan stakeholder lainnya;
3. Kurangnya SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 68,68 yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah aspek pembobotan penilaian sebagai berikut:

Tabel II.14 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI TRIWULAN I	NILAI TRIWULAN II	NILAI TRIWULAN III
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	7,50%	10,00%	12,50%
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	10%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Perjanjian Kinerja	5%	5,00%	5,00%	5,00%
3	pengisian input e-planning	5%	1,25%	2,50%	3,75%
4	pengisian input e-performance	5%	1,25%	2,50%	3,75%
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	18,25%	20,50%	22,75%
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	6%	6,00%	6,00%	6,00%
2	Kompetensi	10%	10,00%	10,00%	10,00%
3	Kinerja	8%	2,00%	4,00%	6,00%
4	Disiplin	1%	0,25%	0,50%	0,75%
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	2,39%	7,02%	14,68%
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	6,25%	12,50%	18,75%
Total Nilai		100%	34,39%	50,02%	68,68%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumsel (2024)

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{68,68}{90} \times 100\% = 76,31\%$$

▪ **Realisasi Anggaran**

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2024 sebesar Rp. 90.587.597.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 40.702.465.502,- atau mencapai 44,93%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Melaksanakan pengelolaan naskah masuk dan keluar serta mengoreksi naskah dinas agar sesuai aturan yang berlaku;
3. Meningkatkan pengelolaan arsip baik sesuai dengan pola kearsipan; dan
4. Menyelesaikan capaian laporan bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan tepat waktu sebagai pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
IKK 1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima. Tingkat penyelenggaraan perkantoran dihitung berdasarkan:

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.

Rumus perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan pembobotan penilaian sebagai berikut:

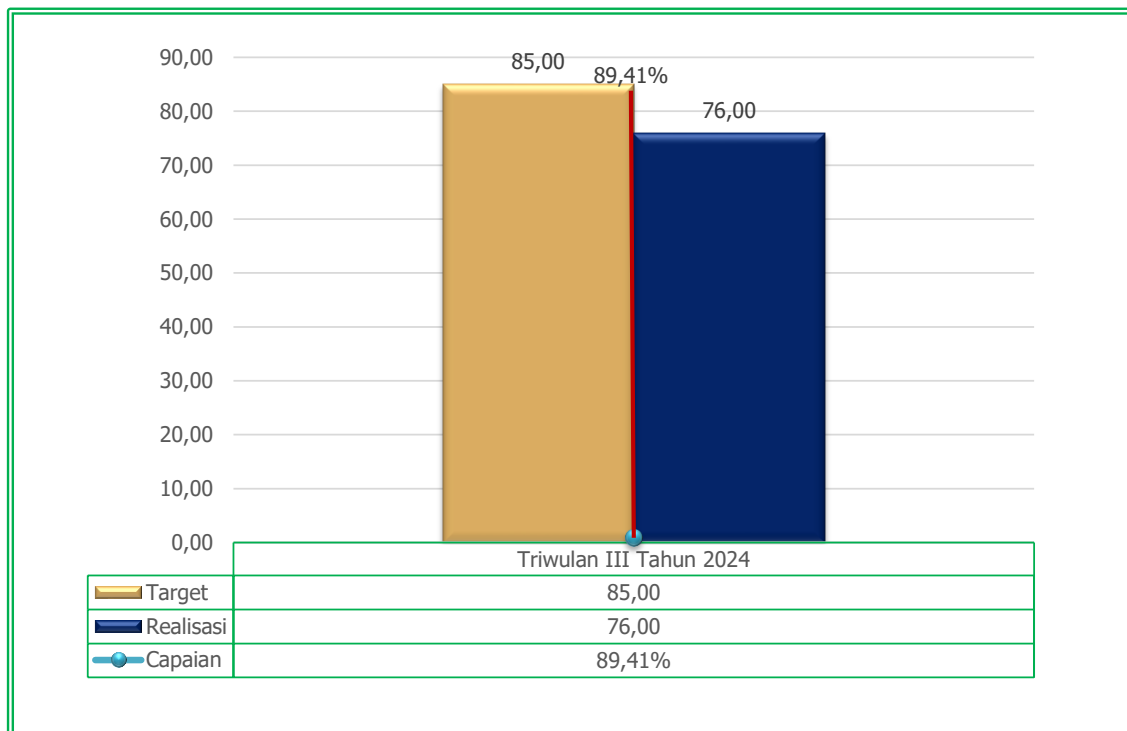
Tabel II. 15 Aspek Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

NO	URAIAN		BOBOT
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15
Total Nilai			100%

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 memiliki nilai 76,0 jika dibandingkan dengan target PK 2024 sebesar 85,0 maka capaian kinerja mencapai 89,41%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.12**



Gambar II.12. Grafik Capaian IKK1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

▪ Dasar Hukum

Dasar hukum Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 154 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

▪ Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel memiliki target 85,0 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilakukan secara maksimal untuk tercapainya manajemen pelayanan perkantoran terhadap seluruh pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Adapun layanan perkantoran meliputi:

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor; dan
2. Gaji dan Tunjangan.

▪ Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Adanya SDM yang berintegritas dan berkompeten;
2. Komunikasi internal antar pegawai berjalan dengan baik;
3. Pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dilaksanakan sesuai jadwal; dan
4. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap bulan.

▪ Faktor Kegagalan

Faktor kegagalan tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat antara lain:

1. Kurangnya SDM yang memiliki integritas yang baik dan tidak berkompeten;
2. Tidak terjalinnya komunikasi antar pegawai di masing-masing sub bagian/seksi; dan
3. Kurangnya dukungan alokasi anggaran kegiatan.

▪ Realisasi Kinerja

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar 76,0 yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah aspek pembobotan penilaian sebagai berikut:

Tabel II.16 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Kegiatan
Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI TRIWULAN I	NILAI TRIWULAN II	NILAI TRIWULAN III
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV	25%	6,3	12,5	16,7
	1 Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15	3,8	7,5	10,0
	2 Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10	2,5	5,0	6,7
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	6,3	12,5	16,7
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%	21,3	30,0	42,5
	1 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x) (Jumlah Kursi dan Meja di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)	20	5,0	10,0	20,0
	2 Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y) (Jumlah PC atau Laptop di Kantor/Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)	15	3,8	7,5	10,0
	3 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z) Rata-rata Kecepatan Internet/Standar Kecepatan Internet	15	12,5	12,5	12,5
Total Nilai		100%	34	55	76

Sumber: Analisa BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

▪ Capaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{76,0}{85,0} \times 100\% = 89,41\%$$

▪ Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 memiliki target anggaran senilai Rp. 35.099.104.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp. 28.403.890.922,- atau mencapai 80,92%.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Di Masa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yaitu:

1. Melaksanakan internalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh kepada seluruh pegawai di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan;
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPTD Kelas II Sumatera Selatan.

II.3 REALISASI ANGGARAN

II.2.1 Alokasi Anggaran Tahun 2024

II.2.1.1 Pagu Anggaran

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 167.139.126.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 17 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp. 113.253.096.000	67,76%
PNBP	Rp. 53.886.030.000	32,24%
SBSN	Rp. -	-
Total	Rp. 167.139.126.000	100%

Tabel II. 18 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp. 22.104.607.000	13,23%
Belanja Barang	Rp. 57.002.795.000	34,10%
Belanja Modal	Rp. 88.031.724.000	52,67%
Total	Rp. 167.139.126.000	100%

Terdapat pergeseran pagu *automatic adjustment* pada DIPA BPTD Kelas II Sumatera Selatan akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan III Tahun 2024. Sehingga Total Pagu pada DIPA BPTD Kelas II Sumatera Selatan pada Triwulan III TA. 2024 adalah sebesar Rp. 173.330.836.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 19 Tabel Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan III Tahun 2024

RM	Rp. 122.545.806.000	69,50%
PNBP	Rp. 53.785.030.000	30,50%
SBSN	Rp. -	-
Total	Rp. 176.330.836.000	100%

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Tabel II.20 Tabel Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan III Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp. 26.580.191.000	15,35%
Belanja Barang	Rp. 58.646.061.000	33,87%
Belanja Modal	Rp. 87.918.224.000	50,77%
Total	Rp. 173.144.476.000	100%

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Pergeseran anggaran sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi Anggaran Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-114/AG/AG.3/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran *Automatic Adjustment* Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

II.2.1.2 Revisi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-114/AG/AG.3/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran *Automatic Adjustment* Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Tahun 2024 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan terdapat pergeseran alokasi anggaran. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel II.21 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-1	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-2	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-3	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-4	113.253.096.000	53.886.030.000	-	167.139.126.000
REVISI KE-5	119.258.446.000	53.886.030.000	-	173.144.476.000
REVISI KE-6	119.258.446.000	53.886.030.000	-	173.144.476.000
REVISI KE-7	119.698.286.000	53.785.030.000	-	173.483.316.000
REVISI KE-8	122.545.806.000	53.785.030.000	-	176.330.836.000
REVISI KE-9	122.545.806.000	53.785.030.000	-	176.330.836.000

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Tabel II.22 Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-1	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-2	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-3	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-4	22.104.607.000	57.002.795.000	88.031.724.000	167.139.126.000
REVISI KE-5	26.580.191.000	58.646.061.000	87.918.224.000	173.144.476.000
REVISI KE-6	26.580.191.000	58.646.061.000	87.918.224.000	173.144.476.000
REVISI KE-7	26.580.191.000	59.085.901.000	87.817.224.000	173.483.316.000
REVISI KE-8	29.427.711.000	59.085.901.000	87.817.224.000	176.330.836.000
REVISI KE-9	29.427.711.000	59.085.901.000	87.817.224.000	176.330.836.000

Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

Tabel II.23 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III
Belanja Pegawai	22.104.607.000	-	22.104.607.000	4.475.584.000	26.580.191.000	2.847.520.000	29.427.711.000
Belanja Barang	57.002.795.000	-	57.002.795.000	1.643.266.000	58.646.061.000	439.840.000	59.085.901.000
· RM	40.295.660.000	-	40.295.660.000	18.096.101.000	58.391.761.000	439.840.000	58.831.601.000
· PNPB	16.707.135.000	-	16.707.135.000	-16.452.835.000	254.300.000	-	254.300.000
Belanja Modal	88.031.724.000	-	88.031.724.000	-113.500.000	87.918.224.000	-101.000.000	87.817.224.000
· RM	34.399.994.000	-	34.399.994.000	-113.500.000	34.286.494.000	-	34.286.494.000
· PNPB	53.631.730.000	-	53.631.730.000	-	53.631.730.000	-101.000.000	53.530.730.000
· SBSN	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	167.139.126.000	-	167.139.126.000	6.005.350.000	173.144.476.000	3.186.360.000	176.330.836.000

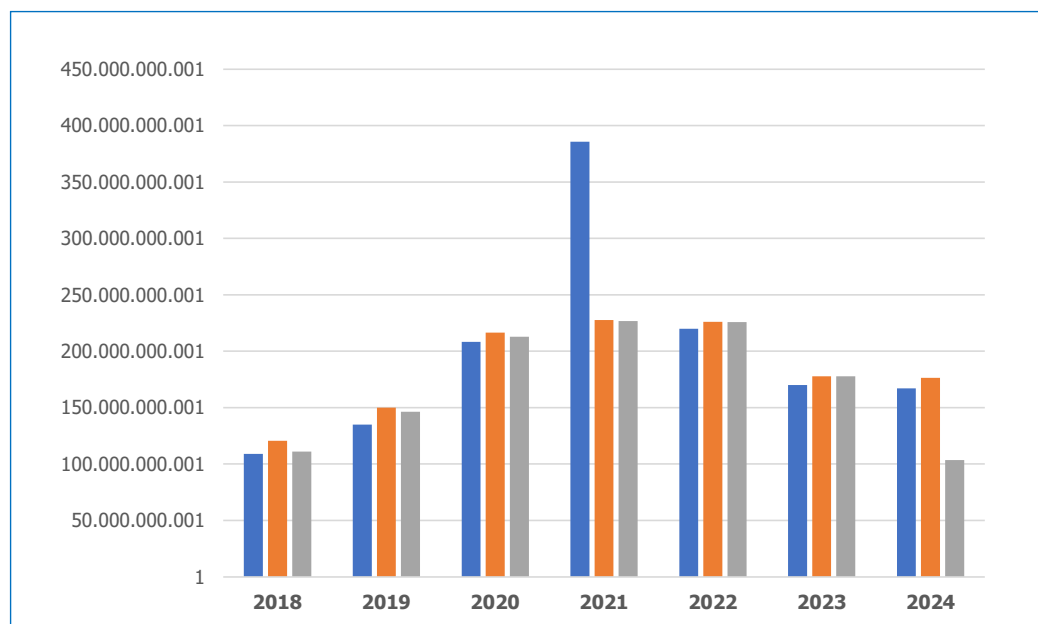
Sumber: Data diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan

II.2.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari Tahun 2017 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 24 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024

No	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	%
1	2017	669.817.000	660.730.410	98,64
2	2018	120.528.305.000	110.980.027.623	92,08
3	2019	150.004.623.000	146.272.982.897	97,51
4	2020	216.371.699.000	212.845.633.145	98,37
5	2021	227.713.955.000	226.635.445.550	99,53
6	2022	225.939.345.000	225.770.641.103	99,73
7	2023	177.722.722.000	177.707.307.773	99,99
8	2024	176.330.836.000	103.525.718.244	58,71



Gambar II.13 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2017 – Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing-masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2021 anggaran yang terserap sebesar Rp226.635.445.550,- atau mencapai 99,53% dari pagu akhir Rp227.713.955.000,. Namun pada tahun 2022 terjadi kenaikan serapan anggaran yaitu sebesar Rp. 225.770.641.103,- atau mencapai 99,93%. Lalu pada tahun 2023 terjadi kenaikan penyerapan anggaran yaitu sebesar Rp. 177.707.307.773,- atau mencapai 99,99%. Pada periode Triwulan III Tahun 2024 penyerapan anggaran sebesar Rp. 103.525.718.244,- (58,71%).

II.2.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

II.2.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.25 Kegiatan Program Yang Ada dalam DIPA Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER	TRIWULAN I		PAGU PER	TRIWULAN II		PAGU PER	TRIWULAN III	
			TRIWULAN I	REALISASI	%	TRIWULAN II	REALISASI	%	TRIWULAN III	REALISASI	%
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	167.139.126.000	167.139.126.000	48.617.515.668	29,09%	173.144.476.000	48.617.515.668	46,53	176.330.836.000	103.525.718.244	58,71%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	139.254.126.000	139.254.126.000	5.563.091.998	3,99%	140.439.533.000	62.275.912.341	44,34	141.122.732.000	74.374.655.592	52,70%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	34.084.861.000	34.084.861.000	588.587.099	1,73%	33.172.888.000	5.236.372.441	15,79%	33.114.165.000	17.071.001.529	51,55%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	69.339.059.000	69.339.059.000	3.248.801.317	4,69%	70.208.755.000	9.076.749.244	12,93%	70.208.755.000	32.488.319.410	46,27%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	30.133.694.000	30.133.694.000	899.581.736	2,99%	26.522.400.000	9.419.354.755	35,51%	31.663.460.000	20.923.705.935	66,08%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	5.696.512.000	5.696.512.000	826.121.846	14,50%	5.696.512.000	2.797.255.690	49,10%	6.136.352.000	3.891.628.718	63,42%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	27.885.000.000	27.885.000.000	11.292.465.998	40,50%	29.559.800.000	16.825.228.734	56,92	35.208.104.000	28.511.238.922	80,98%
4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	109.000.000	109.000.000	7.498.000	6,88%	109.000.000	107.348.000	98,48%	109.000.000	107.348.000	98,48%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.671.393.000	5.671.393.000	1.532.249.889	27,02%	5.671.393.000	2.717.420.263	47,91%	5.671.393.000	4.241.516.535	74,79%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	22.104.607.000	22.104.607.000	9.752.718.109	44,12%	26.580.191.000	16.042.821.174	60,36%	29.427.711.000	24.162.374.387	82,11%

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)



Realisasi penyerapan anggaran Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 103.525.718.244,-** atau mencapai **58,71%** dari total pagu sebesar **Rp. 176.330.836.000,-**.

II.2.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 yang sudah dianalisis per Triwulan III, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.26 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2024

	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	TRIWULAN II		PAGU ALOKASI TRIWULAN III	TRIWULAN III	
		REALISASI	%		REALISASI	%		REALISASI	%
Belanja Pegawai	22.104.607.000	9.742.631.000	44,08	26.580.191.000	17.861.727.876	67,20	29.427.711.000	24.155.103.795	82,08
Belanja Barang	57.002.795.000	6.232.528.185	10,93	58.646.061.000	21.235.859.415	36,21	59.085.901.000	40.016.998.775	67,73
• RM	40.295.660.000	6.232.528.185	15,47	58.391.761.000	21.235.859.415	36,37	58.831.601.000	40.016.998.775	68,02
• PNBPNBP	16.707.135.000	-	-	254.300.000	-	-	254.300.000	-	-
Belanja Modal	88.031.724.000	7.498.000	,01	87.918.224.000	9.519.928.377	10,83	87.817.224.000	39.353.615.674	44,81
• RM	34.399.994.000	7.498.000	0,02	34.286.494.000	5.210.861.318	15,20	34.286.494.000	16.938.261.961	49,40
• PNBPNBP	53.631.730.000	-	-	53.631.730.000	4.309.067.059	8,03	53.530.730.000	22.415.353.713	41,87
• SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	167.139.126.000	15.982.657.185	9,56	173.144.476.000	48.617.515.668	28,08	176.330.836.000	103.525.718.244	58,71

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 pada Triwulan III sebesar **58,71%** dari Pagu Alokasi Anggaran sebesar Rp. 176.330.836.000,-.



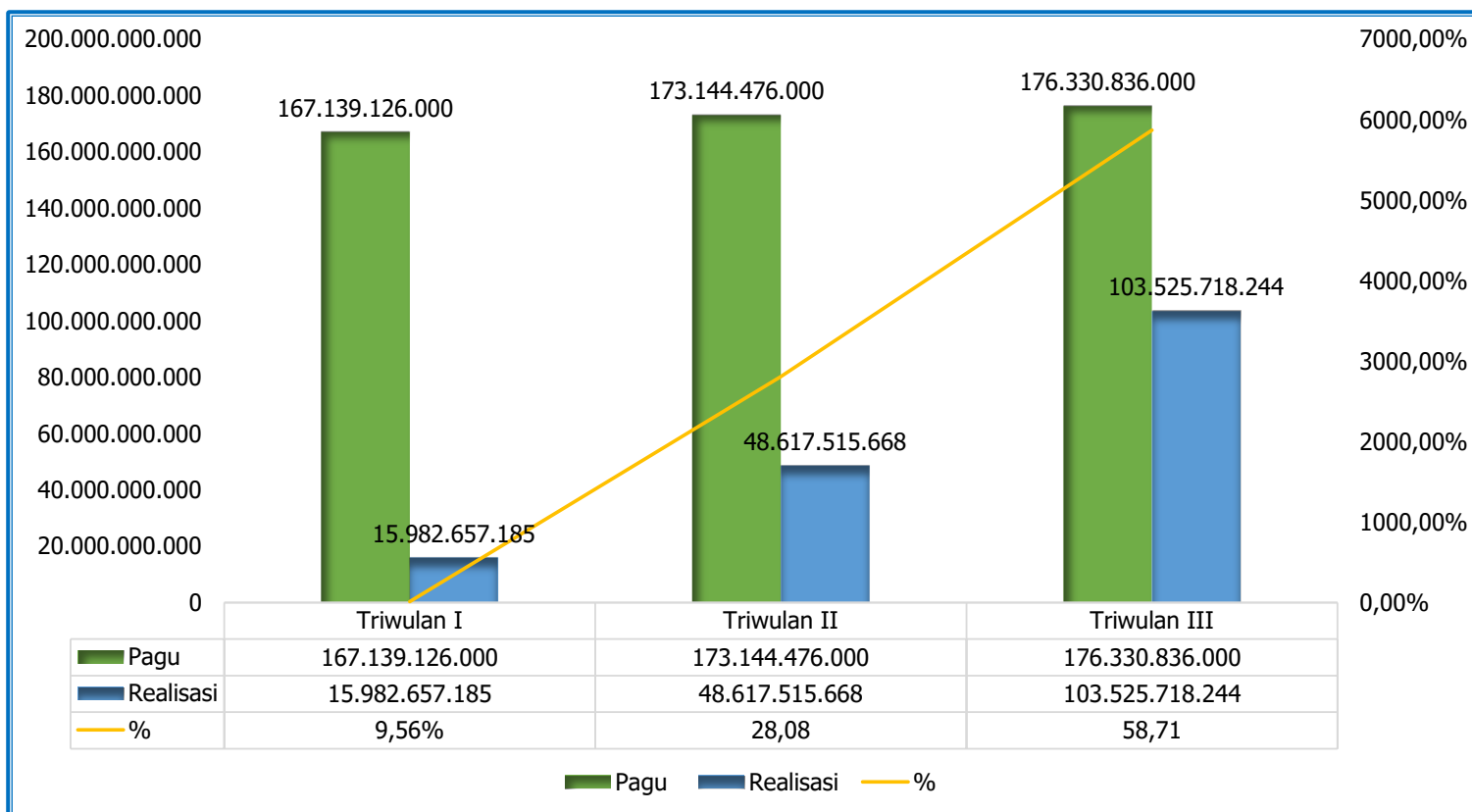
II.2.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada Tahun 2024 yang sudah dianalisis per Triwulan III dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.27 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan III Tahun 2024

No.	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI TRIWULAN I	REALISASI TRIWULAN I		PAGU ALOKASI TRIWULAN II	REALISASI TRIWULAN II		PAGU ALOKASI TRIWULAN III	REALISASI TRIWULAN III	
			Rp.	%		Rp.	%		Rp.	%
1	· RM	113.253.096.000	15.982.657.185	14,11%	119.258.446.000	44.308.448.609	37,15%	122.545.806.000	81.110.364.531	66,19%
2	· PNBP	53.886.030.000	-	-	53.886.030.000	4.309.067.059	8,00%	53.785.030.000	22.415.353.713	41,68%
3	· SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		167.139.126.000	15.982.657.185	9,56%	173.144.476.000	48.617.515.668	28,08%	176.330.836.000	103.525.718.244	58,71%

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)



Gambar II.14 Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan III Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III terealisasi sebesar **58,71%**.

II.2.2.4. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada Tahun 2024 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.28 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS RUPIAH	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	Belanja Pegawai	29.427.711.000	24.155.103.795	5.272.607.205
2	Belanja Barang	59.085.901.000	40.016.998.775	19.068.902.225
3	Belanja Modal	87.817.224.000	39.353.615.674	48.463.608.326
TOTAL		176.330.836.000	103.525.718.244	72.805.117.756

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Tabel II.29 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA PAGU
1	RUPIAH MURNI	122.545.806.000	81.110.364.531	41.435.441.469
2	PNBP	53.785.030.000	22.415.353.713	31.369.676.287
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		176.330.836.000	103.525.718.244	72.805.117.756

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

II.2.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan III Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.30 Efisiensi anggaran

NO.	SASARAN KEGIATAN /	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan I	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan II	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi Triwulan III
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	73,73%	72,00%	1,73%	79,90%	65,71%	14,19%	90,60%	81,55%	9,05%
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	61,42%	59,44%	1,98%	101,23%	76,28%	24,95%	99,50%	78,87%	20,63%
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	24,89%	29,51%	-4,62%	68,63%	30,40%	38,23%	69,91%	47,00%	22,91%
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	38,21%	64,84%	-26,63%	63,38%	109,77%	-46,39%	76,31%	59,91%	16,40%
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	55,88%	150,39%	-94,51%	76,47%	135,08%	-58,61%	89,41%	107,90%	-18,49%
TOTAL		50,83%	75,24%	-24,41%	77,92%	83,45%	-5,53%	85,15%	75,05%	10,10%

Sumber: Data Diolah dari BPTD Kelas II Sumatera Selatan (2024)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 85,15%, dengan realisasi keuangan sebesar 75,05% menunjukkan adanya efisiensi antara rata-rata kinerja dengan rata-rata keuangan sebesar 10,10%.

II.2.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain sistem perencanaan yang masih belum optimal dalam mengalokasikan kebutuhan anggaran dan terdapat kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan sehingga terlambat dalam mengajukan proses pencairan anggaran.



BAB III

PENUTUP





Penutup

III.1 Penutup

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.





Sebagai penutup dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

13. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2024. Terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 71,80 (target 100,0);
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 7,0 (target 7,0);
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 6,0 (target 6,0);
4. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A sebesar terealisasi sebesar 26,25 (target 25,0);
5. Persentase penerapan SMART terminal tipe-A terealisasi sebesar 51,42 (target 55,0);
6. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP terealisasi sebesar 80,0 (target 80,0);
7. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 79,10 (target 80,0);
8. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 16,85 (target 16,0);
9. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 0,0 (target 840,0);
10. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 70,58 (target 82,0);
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi sebesar 68,68 (target 90,0); dan
12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 76,0 (target 85,0).

14. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

15. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *zero accident*.





LAMPIRAN